



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

*“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan yang Cukup secara
Berkelanjutan untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan”*

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023



**Kelompok Keuangan dan BMN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan**



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal



Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003



**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal



Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 Belanja Sektoral Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.772.836.783,00 atau mencapai 226,59% dari estimasi Pendapatan-LRA yang dilaporkan sebesar Rp6.078.227.000,00.

Realisasi Belanja Negara (*netto*) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.224.389.009.145,00 atau mencapai 94,58% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.409.242.955.000,00 dengan realisasi terbesar adalah belanja barang, yaitu Rp3.173.865.377.845,00.

Realisasi belanja barang salah satunya adalah belanja 526, yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada kegiatan-kegiatan seperti Fasilitas Penerapan Budidaya Padi dan Jagung; Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi Lainnya; Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat; Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; serta Fasilitas Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Adapun realisasi belanja 526 (*netto*) adalah Rp2.703.373.571.105,00 atau 94,53% persen dari pagu anggarannya sebesar Rp2.859.688.283.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.977.260.252.575,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp21.011.805.780,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.466.855.992.077,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp3.096.564.352,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp486.295.890.366,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp440.877.543.633,00 dan Rp1.536.382.708.942,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.139.183.924,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.240.680.764.313,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.233.541.580.389,00). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.367.365.831,00 dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.228.174.214.558,00).


Dari realisasi belanja 526 sebesar Rp2.703.373.571.105,00, menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp2.702.838.028.142,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.708.565.036.602, ditambah Defisit-LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp(3.228.174.214.558,00), kemudian dikurang koreksi-koreksi yang mengurangi Ekuitas senilai Rp(2.760.924.996,00) pada Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain, serta Transaksi Antar Entitas senilai Rp3.058.752.811.894,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.536.382.708.942,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		%thdAngg	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.078.227.000	13.772.836.783	226,59	13.840.374.492
JUMLAH PENDAPATAN		6.078.227.000	13.772.836.783	226,59	13.840.374.492
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	41.224.291.000	39.985.369.997	96,99	41.165.307.440
Belanja Barang	B.4	3.357.460.095.000	3.173.865.377.845	94,53	2.173.912.456.475
Belanja Modal	B.5	10.558.569.000	10.538.261.303	99,81	9.816.737.729
JUMLAH BELANJA		2.742.035.167.000	1.176.952.369.934	94,58	2.224.894.501.644



II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Dec 23	31 Dec 22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	19.188.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	326.405.712	765.962.180
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3.1	1.839.375.520	3.576.022.375
Piutang Bukan Pajak	C.4	372.002.693	374.496.226
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	-	243.937.226	243.937.226
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	252.404.318	1.695.746.218
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	C.6	252.404.318	1.695.746.218
Persediaan	C.7	18.717.959.081	50.172.599.308
JUMLAH ASET LANCAR		21.011.805.780	54.664.330.863
ASET TETAP			
Tanah	C.12	1.259.764.248.577	1.403.737.174.577
Peralatan dan Mesin	C.13	431.949.687.589	542.420.355.088
Gedung dan Bangunan	C.14	200.771.665.145	211.838.054.712
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	7.825.163.162	7.836.695.072
Aset Tetap Lainnya	C.16	2.893.357.950	5.464.606.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	436.348.130.346	533.448.614.637
JUMLAH ASET TETAP		1.466.855.992.077	1.637.848.270.962
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan			
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	4.003.005.410	11.963.678.512
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan	C.9	2.211.101.108	10.719.121.645
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.10	6.551.754.429	8.362.015.409
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.11	5.247.094.379	4.264.944.574
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		3.096.564.352	5.341.627.702
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	829.931.779	628.274.779
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	476.549.087.340	-
Aset Lain-lain	C.21	175.716.898.763	72.772.932.090
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.22	166.800.027.516	62.429.697.498
JUMLAH ASET LAINNYA		486.295.890.366	10.971.509.371
JUMLAH ASET		1.977.260.252.575	1.708.825.738.898
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	440.551.137.921	241.514.296
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	19.188.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	326.405.712	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		440.877.543.633	260.702.296
JUMLAH KEWAJIBAN		440.877.543.633	260.702.296
EKUITAS			
Ekuitas		1.536.382.708.942	1.708.565.036.602
JUMLAH EKUITAS		1.536.382.708.942	1.708.565.036.602
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.977.260.252.575	1.708.825.738.898



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	D.1	7.139.183.924	7.393.433.923
JUMLAH PENDAPATAN		7.139.183.924	7.393.433.923
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	39.980.929.997	41.165.307.440
Beban Persediaan	D.3	12.025.303.924	12.872.191.881
Beban Barang dan Jasa	D.4	220.620.724.484	212.117.545.619
Beban Pemeliharaan	D.5	10.243.857.269	10.071.223.542
Beban Perjalanan Dinas	D.6	228.073.724.763	175.004.283.398
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.702.838.028.142	2.437.617.384.260
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	25.985.725.565	27.981.270.152
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	912.470.169	(17.417.086)
JUMLAH BEBAN		3.240.680.764.313	2.916.817.841.552
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.233.541.580.389)	(2.909.418.355.283)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(4.700.473.939)	(235.824.409)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	442.586.509	402.568.696
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	(5.143.060.448)	(638.393.105)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	10.067.839.770	38.009.648.941
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	10.067.839.770	58.129.405.271
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	(20.119.756.330)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.367.365.831	37.773.824.532
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.228.174.214.558)	(2.871.644.530.751)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.17	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.228.174.214.558)	(2.871.644.530.751)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TANAMANPANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.708.565.036.602	2.736.009.931.019
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.228.174.214.558)	(2.871.644.530.751)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(2.760.924.996)	(204.126.165.812)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	(2)	(18.109.866.769)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	-	698.745.875
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	(680.538.485)	(2.167.489.125)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	(2.080.386.509)	(184.547.555.793)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.058.752.811.894	2.048.325.802.146
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(172.182.327.660)	(1.027.444.894.417)
EKUITAS AKHIR	E.7	1.536.382.708.942	1.708.565.036.602

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” Pada RPJMN ke empat (2020- 2025), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Adapun prioritas Kementerian Pertanian yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; serta peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi disektor riil dan industrialisasi. Pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai target nasional yang didukung oleh sektor pertanian bahwasanya tidak ada lagi visi misi K/L dan hanya ada Visi Misi Presiden menjadikan ruang lingkup dukungan sektor pertanian dalam pembangunan nasional semakin meluas diantaranya:

1. Peningkatan investasi pertanian
2. Peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian
4. Penurunan tingkat kehilangan hasil (losses)
5. Peningkatan efisiensi biaya produksi
6. Dukungan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pengusaha pertanian milenial
7. Peningkatan ekspor komoditas dan hasil pertanian
8. Penurunan daerah rawan pangan dan stunting
9. Family farming dan pertanian masuk sekolah (dunia pendidikan)
10. Pemanfaatan dan pengembangan pertanian dalam kluster daerah utama, andalan dan pengembangan.

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Selain itu, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat bersentuhan dengan prioritas keenam dan ketujuh dari nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mewujudkan

kemandirian ekonomi.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki batasan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi tertentu. Sesuai prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2020-2024, telah ditetapkan lima komoditas pangan utama sebagai sasaran swasembada, tiga diantaranya adalah komoditas tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai, serta komoditas di luar tanaman pangan yaitu Gula dan Daging.

Selain itu, selama tahun 2020-2024 terdapat empat komoditi yang harus ditingkatkan produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada, jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe, serta ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bio-industri.

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan tanaman pangan, dan dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah:

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan;**
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.**

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan swasembada padi, jagung, dan meningkatnya produksi kedelai;
- b. Berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai ekonomi; dan
- c. Mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.

Oleh karena itu sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing Tanaman Pangan; dan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain

3. Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.
4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.
5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
7. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
8. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultur.

A.2. Implementasi Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MonSAKTI LK

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengimplementasikan Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI LK sejak tahun 2022 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S- 29/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester 1 Tahun 2022 (*Audited*) serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dan mempertimbangkan implementasi rekonsiliasi menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang sedang berjalan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2023 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2023 (Audited) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 70 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 70 satker (100%). Rincian satker tersebut tersaji pada **Tabel A.1** berikut:

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

No.	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	34	-	70
Jumlah			1	-	2	-	33	-	34	-	70

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui aplikasi MonSAKTI LK per tanggal 19 Februari 2024.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Satker melakukan Pengambilan data LK dari aplikasi MonSAKTI yang sudah melalui proses verifikasi awal oleh Tim Verifikator Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SAKTI secara berjenjang.
3. Penyusunan laporan keuangan berjenjang dari Satker ke Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima alokasi Pagu Definitif APBN Rp2.722.330.155.000,00, didalam tahun berjalan terdapat beberapa kali revisi sehingga revisi terakhir menjadi Rp3.409.242.955.000,00. atau bertambah sebesar 25,23%. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Semula dan Pagu Anggaran per 31 Desember 2023 seperti tampak pada **Tabel A.2**.

Tabel A.2 Perbandingan Pagu Anggaran Definitif dan Revisi per Desember 2023 Berdasarkan Kegiatan

NO	ESELON II	PAGU DIPA	
		KE-1 (17 Apr 23)	KE-7 (29 Dec 23)
Jumlah :		2.722.330.155.000	3.409.242.955.000
1	Akabi	488.487.095.000	414.105.277.000
2	Serealialia	727.944.923.000	1.034.818.890.000
3	Perbenihan	558.575.551.000	909.352.227.000
4	Perlindungan	152.948.083.000	142.425.017.000
5	Dukmen	151.384.584.000	143.357.059.000
6	BBPPMBTPH	22.265.482.000	20.144.760.000
7	BBPOPT	21.777.181.000	20.887.826.000
8	PPHTP	598.947.256.000	724.151.899.000

Dalam tahun berjalan terdapat revisi anggaran di kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, revisi tambah dan revisi kurang sehingga pagu Ditjen Pangan akhir senilai Rp3.409.242.955.000,00-.

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima hibah dari Mercy USA Aid and Development senilai USD 654 600 atau senilai Rp728.481.109,- berupa belanja jasa dan senilai Rp121.098.860,- berupa barang barang.dalam kegiatan Promoting Livelihoods of Farmer/Breeders in Rural Area Through Implementation Sustainable Agriculture Business dengan nomor Register 2XW81CNA.

Laporan SAKTI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber dayaekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya seperti pada **Tabel A.3**.

Tabel A.3 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);

3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
 5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
 6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
 7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
 8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).
- Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - 1) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - 2) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - 3) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - 4) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Hibah;
 - 2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
 - 3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
 - 4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
 - 5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai

berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca

pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tetap seperti pada **Tabel A.4** di bawah ini.

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud tampak pada **Tabel A.5.**

Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sampai dengan 31 Desember 2023 setelah revisi senilai Rp3.409.242.955.000,00 yang sebelumnya senilai Rp3.000.511.911.000,00 dan estimasi pendapatan senilai Rp6.078.227.000,00.

Adapun perbandingan pagu anggaran awal dan pagu anggaran per 31 Desember 2023 seperti pada **Tabel B.1**.

Tabel B.1 Perbandingan Estimasi dan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2023

Uraian	Pagu Awal	Pagu per 31 Desember 2023	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	3.096.120.000	3.139.995.000	1,42%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.685.900.000	1.696.750.000	0,64%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	0,00%
Pendapatan Jasa Lainnya	1.235.832.000	1.241.482.000	0,46%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	0,00%
Pendapatan Denda	-	-	0,00%
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00%
Jumlah	6.017.852.000	6.078.227.000	1,00%
Belanja Pegawai	50.483.974.000	41.224.291.000	-18,34%
Belanja Barang	2.933.877.853.000	3.357.460.095.000	14,44%
Belanja Modal	16.150.084.000	10.558.569.000	-34,62%
Jumlah	3.000.511.911.000	3.409.242.955.000	13,62%

Berdasarkan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka perubahan pagu anggaran seperti tampak pada **Tabel B.2**.

Tabel B.2 Perbandingan Anggaran Belanja Awal dan Revisi Per Kegiatan

NO	Kegiatan	PAGU DEFINITIF (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)
1	1761. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	766.668.851.000	414.105.277.000,	-352.563.574.000,00
2	1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	676.337.890.000	1.034.818.890.000,	358.481.000.000,00
3	4579. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	571.363.803.000	920.732.526.000,	349.368.723.000,00
4	4580. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	216.525.116.000	153.153.893.000,	-63.371.223.000,00
5	1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	170.668.995.000	162.280.470.000,	-8.388.525.000,00
6	5885. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	598.947.256.000	724.151.899.000,	125.204.643.000,00
	JUMLAH	3.000.511.911.000,00	3.409.242.955.000	408.731.044.000,00

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-3826/RC.110/A/11/2023 tentang Refocusing Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023, untuk memenuhi target Refocusing senital 1 T, realokasi internal Ditjen TP ditetapkan senilai Rp235.521.782.000,- dan realokasi eksternal ke Ditjen TP senilai Rp698.478.218.000,-.

Sehingga pada Revisi DIPA ke-12 satker KP.238251 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, semula Rp2.710.764.737.000,- menjadi Rp3.409.242.955.000,-, revisi Refocusing Anggaran Tahun 2023 tersebut dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan dan Percepatan Tanam Padi dan Jagung,

Realokasi Intenal dan External sebagai berikut :

Kode	Program / Kegiatan / KRO / RO	Semula (Rp)	Refocusing Internal (Rp)	Refocusing External (Rp)	Pagu DIPA 12+Refocusing
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	550.255.156.000	- 160.323.257.000	173.896.743.000	724.151.899.000
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	459.427.481.000	- 45.322.204.000		414.105.277.000
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	677.299.069.000	- 4.609.179.000	312.197.617.000	1.034.818.890.000
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	705.987.845.000	- 22.406.319.000	212.383.858.000	920.732.526.000
	BBPPMBTPH Cimanggis		- 500.000.000		
4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	154.553.893.000	- 1.400.000.000		153.153.893.000
1766	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen TP	163.241.293.000	- 960.823.000		162.280.470.000
		2.710.764.737.000	- 235.521.782.000	698.478.218.000	3.409.242.955.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.772.836.783,00 atau mencapai 226,59% dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.078.227.000,00.

Estimasi pendapatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat pada Unit Pelaksana Teknis BPSBTPH, BPMPT, BPOPT dan BBPPMBTPH.

Ditjen Tanaman Pangan sebagai Direktorat Teknis tidak ditargetkan dalam penerimaan negara sehingga tidak semua penerimaan memiliki estimasi.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada **Tabel B.3**.

Tabel B.3 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023

Uraian	Pendapatan per 31 Desember 2023				
	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Pendapatan Netto	%Real Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Luran Badan Usaha	3.139.995.000	4.226.185.009	-	4.226.185.009	134,59
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.696.750.000	1.770.035.359	-	1.770.035.359	104,32
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	-	16.185.000	-	16.185.000	(100,00)
Pendapatan Jasa Lainnya	1.241.482.000	983.508.380	-	983.508.380	79,22
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	699.828.989	-	699.828.989	-
Pendapatan Denda	-	574.746.122	-	574.746.122	-
Pendapatan Lain-lain	-	5.502.347.924	-	5.502.347.924	-
Jumlah Pendapatan Bruto	6.078.227.000	13.772.836.783	-	13.772.836.783	226,59

Secara umum realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (0,49%) dibandingkan 31 Desember 2022 hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pengembalian ke kas negara.

Tabel B.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023			31 Desember 2022			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Pendapatan	Pengemb. Pendapatan	Pendapatan Netto	Realisasi Pendapatan	Pengemb. Pendapatan	Pendapatan Netto	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	4.226.185.009	-	4.226.185.009	4.635.275.396	-	4.635.275.396	(8,83)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.770.035.359	-	1.770.035.359	1.624.831.667	-	1.624.831.667	8,94
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan	16.185.000	-	16.185.000	162.862.000	-	162.862.000	(90,06)
Pendapatan Jasa Lainnya	983.508.380	-	983.508.380	1.003.279.799	-	1.003.279.799	(1,97)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	699.828.989	-	699.828.989	820.877.864	-	820.877.864	(14,75)
Pendapatan Denda	574.746.122	-	574.746.122	366.115.507	-	366.115.507	56,98
Pendapatan Lain-lain	5.502.347.924	-	5.502.347.924	5.227.132.259	-	5.227.132.259	5,27
Jumlah	13.772.836.783	-	13.772.836.783	13.840.374.492	-	13.840.374.492	(0,49)

Penurunan pendapatan pada tahun 2023, Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha (8,83%), Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (90,06%), Pendapatan Jasa Lainnya (1,97%) dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening (14,75%).

Kenaikan pendapatan pada tahun 2023 terdapat pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 8,94%, Pendapatan Denda 56,98% dan Pendapatan Lain-lain 5,27%.

Rincian penerimaan berdasarkan akun pendapatan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	2.768.625.000,	3.724.508.500,	0,	3.724.508.500,	134,53
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	350.000.000,	442.586.509,	0,	442.586.509,	126,45
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.370.000,	23.090.000,	0,	23.090.000,	150,23
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.000.000,	36.000.000,	0,	36.000.000,	600,00
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	600.000,	247.600.000,	0,	247.600.000,	41266,67
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	1.696.150.000,	1.522.435.359,	0,	1.522.435.359,	89,76
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,	16.185.000,	0,	16.185.000,	0,
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	734.400.000,	449.632.380,	0,	449.632.380,	61,22
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	507.082.000,	533.876.000,	0,	533.876.000,	105,28
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,	8.291.268,	0,	8.291.268,	0,
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,	43.266.000,	0,	43.266.000,	0,
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,	62.236.700,	0,	62.236.700,	0,
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0,	586.035.021,	0,	586.035.021,	0,
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,	574.746.122,	0,	574.746.122,	0,
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	22.045.781,	0,	22.045.781,	0,
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	5.442.314.836,	0,	5.442.314.836,	0,
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	5.303.312,	0,	5.303.312,	0,
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,	25.424.700,	0,	25.424.700,	0,
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,	4.440.000,	0,	4.440.000,	0,
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,	2.819.295,	0,	2.819.295,	0,
	JUMLAH PENDAPATAN	6.078.227.000,	13.772.836.783	0,	13.772.836.783	226,59

B.2 BELANJA

Belanja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.224.389.009.145,00 atau mencapai 94,58% dari pagu senilai Rp3.409.242.955.000,00, dengan realisasi terbesar adalah belanja barang senilai Rp3.173.865.377.845,00.

Tabel B.5 menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 berdasarkan jenis belanja.

Tabel B.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	41.224.291.000	40.010.416.210	25.046.213	39.985.369.997	96,99%
Belanja Barang	3.357.460.095.000	3.175.602.884.450	1.737.506.605	3.173.865.377.845	94,53%
Belanja Modal	10.558.569.000	10.538.321.303	60.000	10.538.261.303	99,81%
JUMLAH BELANJA	3.409.242.955.000	3.226.151.621.963	1.762.612.818	3.224.389.009.145	94,58%

Realisasi belanja terbesar pada belanja barang dimana dalam belanja barang terdapat belanja bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat/pemda.

Komposisi anggaran dan realisasi per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam **Grafik 1**.

Grafik B.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023



Terdapat 5 (lima) Direktorat Teknis yang mendukung Program Pembangunan Tanaman Pangan, Dit.Akabi, Dit.Seralia, Dit.Perbenihan dan Dit. PPHTP, disamping itu juga terdapat Balai Besar yaitu BBPOPT, BBPPMBTPH dan BPMPT.

Pada Direktorat Teknis terdapat kegiatan Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Kelompok Tani berupa benih, Saprodi dan Alsintan, benih berupa benih padi, jagung dan kedelai, saprodi berupa obat-obatan dan pupuk, alsintan berupa alat pascapanen dan Unit Pengolah Hasil (UPH), adapun satuan target bantuan berupa Ha, Kg dan unit.

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 44,92%. **Tabel B.7** menunjukkan perbandingan realisasi belanja netto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan jenis belanja.

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	'31 DESEMBER 2023		'31 DESEMBER 2022		NAIK (TURUN) %
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	41.224.291.000	39.985.369.997	44.766.868.000	41.165.307.440	(2,87)
Belanja Barang	3.357.460.095.000	3.173.865.377.845	2.224.422.722.000	2.173.912.456.475	46,00
Belanja Modal	10.558.569.000	10.538.261.303	10.130.864.000	9.816.737.729	7,35
Jumlah	3.409.242.955.000	3.224.389.009.145	2.279.320.454.000	2.224.894.501.644	44,92

Dari **Tabel B.7** secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan realisasi dari tahun anggaran sebelumnya 44,92%, walaupun secara detail realisasi berbanding dengan pagu tahun berjalan dimasing-masing belanja mencapai di atas 94 %.

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 39.985.369.997,00 dan Rp 41.165.307.440,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 3,07% dibandingkan belanja pegawai per 31 Desember 2022.

Perbandingan belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tampak pada **Tabel B.8**.

Tabel B.8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023			31 Desember 2022			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	
Belanja Gaji Pokok PNS	28.586.276.980,		28.586.276.980,	29.267.191.420,	864.000,	29.266.327.420,	-2,38%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	427.707,	6.383,	421.324,	440.820,	2.704,	438.116,	-3,99%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.042.529.188,	297.924,	2.042.231.264,	2.102.020.452,	3.375.300,	2.098.645.152,	-2,76%
Belanja Tunj. Anak PNS	605.900.201,	119.170,	605.781.031,	618.938.027,	0,	618.938.027,	-2,17%
Belanja Tunj. Struktural PNS	451.935.000,	0,	451.935.000,	496.850.000,	2.520.000,	494.330.000,	-9,38%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.194.030.000,	13.120.000,	3.180.910.000,	2.819.992.000,	9.191.000,	2.810.801.000,	11,64%
Belanja Tunj. PPh PNS	164.800.230,	0,	164.800.230,	152.895.605,	0,	152.895.605,	7,22%
Belanja Tunj. Beras PNS	1.612.431.300,	217.260,	1.612.214.040,	1.683.475.320,	724.200,	1.682.751.120,	-4,38%
Belanja Uang Makan PNS	2.563.944.000,	0,	2.563.944.000,	2.901.025.000,	0,	2.901.025.000,	-13,15%
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,00%
Belanja Tunjangan Umum PNS	685.930.000,	11.285.250,	674.644.750,	833.730.000,	390.000,	833.340.000,	-23,52%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	13.923.604,	0,	13.923.604,	0,	0,	0,	100,00%
Belanja Uang Lembur	88.288.000,	0,	43.813.000,	305.816.000,	0,	305.816.000,	-598,00%
Jumlah Belanja Pegawai	40.010.416.210,	25.045.987,	39.940.895.223,	41.182.374.644,	17.067.204,	41.165.307.440,	-3,07%

Adapun data jumlah pegawai lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat pada Lampiran B.2.

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.139.976.377.697,00 dan Rp1.262.252.991.254,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 9,69% dibandingkan per 31 Desember 2022.

Rincian perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ada pada **Tabel B.9**.

Tabel B.9 Rincian Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023			31 Desember 2022			NAIK (TURUN) %
	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto	
Belanja Barang Operasional	25.654.628.691	365	25.654.628.326	29.329.846.982,00	-	29.329.846.982,00	(12,53)
Belanja Barang Non Operasional	157.932.691.516	2.127.659	157.930.563.857	332.053.695.564,00	70.556.630,00	331.983.138.934,00	(52,44)
Belanja Barang Persediaan	12.899.872.126	-	12.899.872.126	9.207.359.209,00	702.800,00	9.206.656.409,00	40,10
Belanja Jasa	36.284.565.336	4.177.500	36.280.387.836	31.060.360.085,00	82.521.083,00	30.977.839.002,00	16,82
Belanja Pemeliharaan	9.674.479.832	-	9.674.479.832	8.971.346.914,00	-	8.971.346.914,00	7,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	227.537.900.441	378.455.558	227.159.444.883	174.625.874.063,00	379.761.481,00	174.246.112.582,00	30,30
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.145.056.820	252.626.940	892.429.880	701.355.816,00	-	701.355.816,00	63,26
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	656.634.636.844	796.793.583	655.837.843.261	438.755.102.217,00	-	438.755.102.217,00	49,66
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan	54.140.000	-	54.140.000	-	-	-	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	2.047.784.912.844	303.325.000	2.047.481.587.844	1.150.146.814.119,00	405.756.500,00	1.149.741.057.619,00	78,05
JUMLAH	3.175.602.884.450	1.737.506.605	3.173.865.377.845	2.174.851.754.969,00	939.298.494,00	2.173.912.456.475,00	45,98

Berdasarkan **Tabel B.9** realisasi belanja barang Non Bantuan Pemerintah terbesar per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

AKUN	BELANJA	NILAI BRUTO
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12.163.686.708,
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	713.681.281,
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	166.591.582,
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11.410.200.000,
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.072.267.195,
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	128.201.925,
521211	Belanja Bahan	35.168.592.791,
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	71.473.888.560,
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	51.276.557.966,
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	13.652.199,
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.942.955.649,
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	1.571.264.342,
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	3.928.782.975,
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1.450.374.200,
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	6.494.960,
522111	Belanja Langganan Listrik	3.184.414.269,
522112	Belanja Langganan Telepon	246.829.816,
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.318.578.107,
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2.845.800,
522131	Belanja Jasa Konsultan	580.477.000,
522141	Belanja Sew a	7.028.625.990,
522151	Belanja Jasa Profesi	7.891.260.100,
522191	Belanja Jasa Lainnya	16.031.534.254,
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.802.779.003,
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.473.122.479,
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.999.000,
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	347.579.350,
524111	Belanja Perjalanan Biasa	150.050.859.654,
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.806.397.820,
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.922.055.540,
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2.250.000,
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.756.337.427,
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.145.056.820,
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		471.129.194.762,
Pengembalian Belanja		662.434.235,
Netto		470.466.760.527,000

BELANJA BANTUAN PEMERINTAH

Tahun 2023 adalah tahun keempat masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu agenda pembangunan RPJMN IV adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan inovasi dan investasi pangan dan pertanian.

Peran subsektor Tanaman Pangan semakin strategis karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, ekspor, dan peningkatan penggunaan fasilitas KUR untuk pengembangan usaha pertanian.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2023 (Audited)

Dalam rangka memperkuat keberhasilan subsektor Tanaman Pangan, Program dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan 2023 dialokasikan untuk mendukung program Utama Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan.

Dari sasaran Strategis Kementerian Pertanian, dijabarkan ke dalam Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut :

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis, peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
- Meningkatnya ketersediaan pangan lokal non beras, peningkatan produksi aneka umbi, dan kacang
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI
- Meningkatkan nilai tambah Komoditas Tanaman Pangan dan
- Meningkatnya daya saing komoditas tanaman pangan

Dalam pelaksanaan sasaran strategis, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Bantuan Pemerintah berupa Benih, Saprodi, Alsintan Panca Panen serta bantuan penanganan OPT dan DPI kepada kelompok tani sesuai Calon Lokasi Calon Penerima (CPCL) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK.).

Realisasi belanja bantuan pemerintah (526) terdiri dari bentuk barang senilai Rp2.667.980.208.688,00,- atau 93,26% dan transfer uang 36.493.481.000,00,- atau 1,27% dari total pagu banpem Rp2.859.688.283.000,00,-.

No	AKUN	BELANJA	NILAI BRUTO
1	52612	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	628.744.786.844,
2	52613	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	249.850.000,
3	526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Transfer Uang	27.640.000.000,
4	526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk	34.840.000,
5	526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	19.300.000,
6	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.038.663.556.844,
7	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	8.853.481.000,
8	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	267.875.000,
Jumlah			2.704.473.689.688,
Pengembalian Belanja			1.100.118.583,
Netto			2.703.373.571.105,000

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 10.538.321.303,00 dan Rp 9.816.737.729,00

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Pembebasan Tanah	232.145.000	-	232.145.000	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	-	-	-	36.963.000	-	36.963.000	-100%
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.442.852.463	60.000	9.442.792.463	7.594.355.259	-	7.594.355.259	24%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.848.000	-	237.848.000	1.754.511.850	-	1.754.511.850	-86%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	324.861.000	-	324.861.000	420.907.620	-	420.907.620	-23%
Belanja Modal Irigasi	53.994.840	-	53.994.840	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	238.620.000	-	238.620.000	10.000.000	-	10.000.000	228620%
Jumlah Belanja	10.538.321.303	60.000	10.538.261.303	9.816.737.729	-	9.816.737.729	7,35

Satker Ditjen Tanaman Pangan memiliki Belanja Modal : Kantor Pusat, BBPPMBTPH dan BBPOPT.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian furniture Kantor, Alat Pengolah data (laptop) dan lain-lain.

Belanja penambahan nilai pada peralatan dan mesin berupa uprage/perbaikan dan renovasi gedung.

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan lanjutan pembangunan Gedung Kantor Direktorat Perlindungan termasuk belanja modal perencanaan dan pengawasan.

B.5.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 240.145.000,00 dan Rp 36.963.000,00.

Tabel B.12 Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Pembebasan Tanah	232.145.000	0	232.145.000	0	0	0	100%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	100%
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	-	-	-	36.963.000	0	36.963.000	-100%
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-	0	0	0	-100%
Jumlah Belanja	240.145.000	-	234.145.000	36.963.000	-	36.963.000	533,46

B.5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.442.792.463,00 dan Rp6.084.418.073,00.

Tabel B.13 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.442.792.463,	60.000,	9.442.732.463,	7.594.355.259,	0,	7.594.355.259,	24,34
Jumlah Belanja	9.442.792.463	60.000	9.442.732.463	7.594.355.259	-	7.594.355.259	24,34

B.5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp562.709.000,00 dan Rp2.175.419.470,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 terdapat pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Adapun realisasi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 74,13% dibandingkan per 31 Desember 2022 karena adanya pembangunan Gedung Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Selain itu, di Satker BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari juga terdapat realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.14 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.848.000	-	237.848.000	1.754.511.850	-	1.754.511.850	- 100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	324.861.000	-	324.861.000	420.907.620	-	420.907.620	- 37,28
Jumlah Belanja	562.709.000	-	562.709.000	2.175.419.470	-	2.175.419.470	- 74,13

B.5.4 BELANJA MODAL JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp53.994.840,00 dan Rp0,00.

Tabel 20. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi Bruto per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Irigasi	53.994.840	-	53.994.840	-	-	-	-
Jumlah Belanja	53.994.840	-	53.994.840	-	-	-	#DIV/0!

B.5.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp238.620.000,00 dan Rp10.000.000,00. Dibandingkan tahun 2022, belanja modal lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00%.

Tabel 21. Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Bruto per 31 Desember 2023	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2023	Realisasi per 31 Desember 2022	Pengemb. Belanja	Realisasi Netto per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	238.620.000	-	238.620.000	10.000.000	-	10.000.000	2.286,20
Jumlah Belanja	238.620.000	-	238.620.000	10.000.000	-	10.000.000	2.286,20

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Nilai
111611 Kas di Bendahara Pengeluaran	0
111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0
J U M L A H	0

Adapun saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.188.000,00. dengan rincian seperti pada **Tabel C.1**.

Tabel C.1 Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	111611	-	19,188,000	-19,188,000	-100
2	111613	-	-	-	-
	Total	-	19,188,000	-19,188,000	-100.00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2022 telah disetorkan ke Kas Negara seperti rincian dibawah ini:

Satker	Tgl Setor	Nilai	NTPN
339086. Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat	06-Jan-23	19.188.000	CD8E00JSQI4258f2
J U M L A H		19.188.000	

C.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp326.405.712,00 dan Rp765.962.180,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Adapun perbandingan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada **Tabel C.3**.

Tabel C.3 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	KODE	Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	326,405,712	765,962,180	- 439,556,468	-135%
		Total	326,405,712	765,962,180	- 439,556,468	-135%

Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp326.405.712,00 pada 31 Desember 2023 merupakan Usulan Jurnal Koreksi (UJK) BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 terkait potongan pajak atas belanja tambahan uang persediaan (TUP) bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024. Rincian pajak yang sudah disetorkan ke kas negara adalah sebagai berikut:

Tgl Setor	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	Jumlah
22-Jan-24	65.061.500,00	11.046.629,00	27.220.859,00	76.106.746,00	179.435.734,00
29-Jan-24	48.282.750,00	8.888.987,00	48.681.236,00	41.117.005,00	146.969.978,00
Jumlah	113.344.250,00	19.935.616,00	75.902.095,00	117.223.751,00	326.405.712,00

Pada Tahun 2022, Saldo Kas Lainnya Dibendahara Pengeluaran sebesar Rp765.962.180,00 merupakan jurnal koreksi BPK RI tahun 2022 atas setoran belanja LS yang baru dibayarkan ditahun 2023.

C.3 .1 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing masing sebesar Rp1.839.375.520,00 dan Rp3.576.022.375,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan Beban bantuan pemerintah transfer uang yang diserahkan ke masyarakat, dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 terdapat bantuan transfer uang yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.619.375.520,00. pada satuan kerja Kantor Pusat, sehingga menjadi UJK di TA. 2023. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyelesaian pertanggungjawaban dan telah dilakukan upload ke aplikasi BAST Banpem. Hasil review itjen atas pertanggungjawaban tersebut telah sesuai.

Adapun saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 yang masih tersisa sebagai berikut:

No	KODE	URAIAN SATKER	JUMLAH
1	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	1,839,375,520
TOTAL			1,839,375,520

Untuk Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 220.000.000 merupakan UJK atas biaya avtur pesawat tahun 2020 yang belum terselesaikan.

Adapun perbandingan Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada **Tabel C.3.1**

Tabel C.3.1 Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	114112	1,839,375,520	3,576,022,375	- 1,736,646,855	-94.42%
	Total	Rp 1,839,375,520	Rp 3,576,022,375	-Rp 1,736,646,855	-94.42%

C.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp372.002.693,00 dan Rp374.496.226,00. Piutang Bukan pajak per 31 Desember 2023 terdiri atas Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya, yaitu:

Akun	Nilai
115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	214.044.876
115212 Piutang Lainnya	157.957.817
J U M L A H	372.002.693

Rincian Piutang PNBPN adalah sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Jenis Sumber Piutang
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Mukhtarrudin	75,606,976	Denda keterlambatan Pek. Pemrth.
		238251/ 129075	Distan TPH Kab. Lamsel	Ir. Supriyono
238251/ 319063	Distan TP dan Perkebunan Kab. Gorontalo	Darwan Usman, SP, M.Si	6,302,500	Denda keterlambatan Pek. Pemrth.
		Irham DJ. Maku	2,617,500	Denda keterlambatan Pek. Pemrth.
J u m l a h			214,044,876	

Piutang PNBPN yang berada di Satker 129075 dan 319063 per 31 Desember 2023 pencatatan Piutang PNBPN di transfer ke satker Pusat 238251 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sementara, rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Ket
Kode	Nama			
020072	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar	-	-	Piutang Lainnya Potongan SPM Pendapatan Sewa
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	-	157.957.817	Temuan BPK atas akuntabilitas penggunaan Anggaran sewa Pesawat TA 2021
J u m l a h			157.957.817	

Adapun perbandingan Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tampak pada **Tabel C.4**.

Tabel C.4 Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Satker	31 Des 2022	Tambah	Kurang	31 Desember 2023
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	75,606,976	0	0	75,606,976
2	129075 Distan TPH Kab. Lampung Selatan	129,517,900	0	0	129,517,900
3	319063 Distan Bun Kab. Gorontalo	8,920,000	0	0	8,920,000
	Total	214.044.876	0	0	214.044.876

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Adapun penjelasan Piutang PNBP pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

1. Piutang Satker Ditjen Tanaman Pangan merupakan piutang dari angsuran sewa rumah dinas, denda keterlambatan pada PT. Mariabe Sanmor, dan Bank Garansi Direktorat PPHTP atas belanja 526 bentuk barang.
2. Piutang Distan TPH Kab. Lampung Selatan merupakan temuan Itjen Kementan atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah.
3. Piutang Distan Kabupaten Gorontalo merupakan temuan Itjen atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun 2008 dan 2009.

C.5 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp252.404.318,00 dan Rp252.404.318,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Adapun Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 terdiri atas:

Akun	Uraian	Jumlah
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	27.200.000
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	225.204.318
Jumlah		252.404.318

**Tabel C.5 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022**

Satker		Debitur	Piutang	Jenis Sumber Piutang
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Mukhtarrudin	27,200,000	- Selisih harga pengadaan benih kedelai - Kelebihan pembayaran benih
079124	Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	1. H. Suryadi 2. Sutino Urip Fatah Toto Prasetyo	- - -	Penyalahgunaan banpem kegiatan pengembangan kedelai tahun 2017
219055	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	1. Ir. Abubakar Marasabessy 2. Husein Salampesy, SP 3. Ir. Ngatmin Syahrir	182,600,000 32,350,000 10,254,318	Kemahalan harga
Jumlah			252.404.318	

Tabel C.6 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	Tambah	Kurang	30 Juni 2023
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	27.200.000	-	-	27.200.000
2	219055 Distan Prov. Maluku	225.204.318	-	-	225.204.318
	Total	252.404.318	-	-	252.404.318

C.6 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(252.404.318,00) dan Rp(252.404.318,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Pada **Tabel C.7** disajikan Perbandingan Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022.

Tabel C.7 Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	(214.044.876,00)	(214.044.876,00)
2	129075 Distan TPH Kab Lampung Selatan	-	-
Piutang Lainnya			
1	020072 BB Jatisari	-	-
2	238251 Ditjen Tanaman Pangan	(157.957.817,00)	(160.451.350,00)
Jumlah		(372.002.693,00)	(374.496.226,00)
Bagian Lancar TP/TGR			
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	(27.200.000,00)	(27.200.000,00)
2	299336 Distanak Prov. Banten	-	(211.800.000,00)
3	319088 Distan TPH Prov. Gorontalo	-	(37.049.400,00)
4	079124 Distan Prov. Sumatera Utara	-	(1.194.492.500,00)
5	219055 Distan Maluku	(225.204.318,00)	(225.204.318,00)
Jumlah		(252.404.318,00)	(1.695.746.218,00)

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNPB adalah:

No.	Uraian Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Kantor Pusat	Macet	Rp 75.606.976,00	100%	(75.606.976,00)
2	Distan TPH Kab. Lampung Selatan	Macet	Rp 129.517.900,00	100%	(129.517.900,00)
3	Distan dan Bun Kab. Gorontalo	Macet	Rp 8.920.000,00	100%	(8.920.000,00)
4	Kantor Pusat	Lancar	Rp 157.957.817,00	0,5%	(29.892.350,00)
Jumlah			Rp 372.002.693,00		(243.937.226,00)

Sementara rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

No.	Uraian Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara	Macet	Rp -	100%	Rp -
2	Ditjen Tanaman Pangan	Macet	Rp 27.200.000	100%	Rp (27.200.000)
3	Distannak Prov. Banten	Macet	Rp -	100%	Rp -
4	Distan Prov. Maluku	Macet	Rp 225.204.318	100%	Rp (225.204.318)
Jumlah			Rp 252.404.318		Rp (252.404.318)

Tabel C.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	%	Nilai
	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	157.957.817	0,50%	(29.892.350)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	214.044.876	100%	(214.044.876)
Jumlah	372.002.693		(243.937.226)
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	252.404.318	100%	(252.404.318)
Jumlah	252.404.318		(252.404.318)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		624.407.011	(496.341.544)

C.7 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp18.717.959.081,00 dan Rp50.172.599.308,00.

Saldo Persediaan 2023 terdiri dari Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, Bahan Baku, Persediaan Lainnya dan Bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat (UJK 2023 kegiatan TA 2023).

Bantuan pemerintah dengan saldo senilai Rp17.658.848.450,00 terdiri dari nilai UJK barang tahun 2023 dan tahun 2022 yang status revidasi pada Bastbanpem masih belum sesuai senilai Rp16.515.554.950,00 serta Rp1.188.293.500,00. Merupakan nilai UJK terkait Koreksi Persediaan Benih pada BBI per 25 Januari 2024. Berikut ini disajikan rincian Persediaan Benih pada BBI seperti pada **Tabel C.9.1 Stock Benih BBI** di bawah ini.

Tabel C.9.1 Stock Benih BBI

No	KODE SATKER	Provinsi	Stok Saat Ini (Kg)	Nilai
1	089076	Sumatera Barat	8725	84,955,000
2	109065	Jambi	2400	24,000,000
3	119072	Sumatera Selatan	22748	183,826,000
4	129065	Lampung	21617	118,551,000
5	139077	Kalimantan Barat	3650	30,867,000

6	159062	Kalimantan Selatan	1952	17,514,000
7	169073	Kalimantan Timur	350	3,150,000
8	209069	Sulawesi Tenggara	11050	99,450,000
9	229067	Bali	5000	45,000,000
10	239071	Nusa Tenggara Barat	56595	486,282,500
11	249099	Nusa Tenggara Timur	4980	50,420,000
12	289073	Maluku Utara	800	3,200,000
13	299336	Banten	3390	36,950,000
14	319055	Gorontalo	344	4,128,000
TOTAL			143601	1,188,293,500

Berikut ini disajikan perbandingan rincian jenis persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 seperti pada **Tabel C.9.2** di bawah ini.

Tabel C.9.2 Perbandingan Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
1	Barang Konsumsi	296,473,175	220,391,328	76,081,847	34.52
2	Bahan untuk Pemeliharaan	2,430,000	4,996,000	- 2,566,000	-51.36
3	Suku Cadang	-	3,070,000	- 3,070,000	-100.00
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-	-
5	Tanah Bangunan Ke Masy	-	-	-	-
6	Hewan dan Tanaman ke Masy	-	-	-	-
7	Peralatan dan Mesin ke Masy	5,312,720,500	36,466,040,430	- 31,153,319,930	-85.43
8	Aset Tetap Lain ke Masy	-	-	-	-
9	Aset Lain-lain ke Masyarakat	-	-	-	-
10	Barang Persed. Lain ke Masy	12,346,127,950	12,266,203,387	79,924,563	0.65
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	-	-	-	-
12	Bahan Baku	601,320,197	1,165,566,488	- 564,246,291	-48.41
13	Persediaan Lainnya	158,887,259	46,331,675	112,555,584	242.93
Total		18,717,959,081	50,172,599,308	- 31,454,640,227	- 62.69

PIUTANG JANGKA PANJANG

C.8 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.003.005.410,00 dan Rp11.963.678.512,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Satker	Debitur	Piutang	Jenis Sumber Piutang
	Nama			
079124	Dinas TPH Prov. Sumatera Utara	Muhammad Juwaini, SP, M.MA, dkk	468.624.850	Dana Banpem tahun 2018 yang masih di rekening Kelompo Tani
119129	Dinas Pertanian Prov. Sumatera Selatan	Suprianto	0	Bantuan benih padi tidak memenuhi mutu dan kualitas
129112	Dinas Pertanian TPH Prov. Lampung	Imam Mashuri, SE	0	Bantuan benih jagung tidak memenuhi mutu dan kualitas
159107	Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	Riza Rosadi, SP	1.167.969.382	Dana Banpem Tahun 2018 yang masih di rekening kelompok tani
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Wady Van Gobel, SP Suyoto, S.TP Kurniawan (Kab Pohuwato)	69.999.250	Sisa dana Banpem di Rekening Kelompok Tani Kelebihan pembayaran dan kemahalan harga
239071	Dinas Pertanian TPH Prov. NTB	Lalu Syamsul Alam, SP	4.266.000	Kelebihan pembayarn
249158	Dinas Pertanian Prov. NTT	1. Fransiscus Fili, 2. Selviana Cundawan, SE 3. Dionisius Wea 4. Elim Melkissedek Nelle	169.906.500	Anggaran yang tidak direalisasikan
299380	Dinas Pertanian Prov. Banten	Yulia Fatmawihartini, Taviara Suyarso, Dasep Setiawan, Muhlis	1.919.739.428	Penyaluran benih jagung tidak lulus uji sertifikasi
299336	Dinas Pertanian Prov. Banten		202.500.000	
319088	Dinas Pertanian Prov. Gorontalo	1.Ir. Asy'ari Hasiru 2. Jasin Mohammad, SE, MPA 3.Moch. Ridwan Nadjamuddin	0	Dana Bansos tidak dilaksanakan
Jumlah			4.003.005.410	

Adapun perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada **Tabel C.10**.

Tabel C.10 Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Satker	31 Desember 2022	Tambah	Kurang	31 Desember 2023
1	059178 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	720.053.342	-	720.053.342	-
2	079124 Dinas TPH Prov. Sumatera Utara	324.132.350	144.492.500	-	468.624.850
3	129112 Distan TPH Prov. Lampung	7.306.546.860	-	7.306.546.860	-
4	238251 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kab Pohuwato)	69.999.250	-	-	69.999.250
5	159107 Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	1.167.969.382	-	-	1.167.969.382
6	239071 Distan TPH Prov. NTB	8.532.000	-	4.266.000	4.266.000
7	249158 Distan Prov. NTT	169.906.500	-	-	169.906.500
8	299380 Dinas Pertanian Prov. Banten	1.957.739.428	-	38.000.000	1.919.739.428
9	299336 Dinas Pertanian Prov. Banten	203.500.000	-	1.000.000	202.500.000
10	309088 Distan Prov Gorontalo	35.299.400	-	35.299.400	-
	Jumlah	11.963.678.512	144.492.500	8.105.165.602	4.003.005.410

C.9 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2.211.101.108,00) dan Rp(10.719.121.645,00). Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel C.11 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

No	Satker	Wilayah	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	020072	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jawa Barat	Lancar	-	0,5%	71.764
2	029159	Dinas TPH Prov. Jawa Barat	Lancar	-	0,5%	-
3	059106	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur	Lancar	-	0,5%	-
4	079124	Dinas TPH Prov. Sumatera Utara	Macet	468.624.850	100,0%	326.475.475
5	099314	Dinas Pangan TPH Prov. Riau	Lancar	-	0,5%	-
6	119129	Dinas TPH Prov. Sumatera Selatan	Macet	-	100,0%	-
7	129112	Dinas TPH Prov. Lampung	Macet	-	100,0%	-
8	159107	Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	Macet	1.167.969.382	0,5%	5.839.847
9	199125	Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan	Lancar	-	0,5%	-
10	239071	Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat	Macet	4.266.000	0,5%	40.660
11	239126	Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat	Macet	-	100,0%	-
12	238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kab Pohuwato)	Macet	69.999.250	100,0%	69.999.250
13	249158	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Macet	169.906.500	76,5%	129.988.095
14	299336	Dinas Pertanian Prov. Banten	Macet	202.500.000	0,5%	1.012.500
15	299380	Dinas Pertanian Prov. Banten	Macet	1.919.739.428	100,0%	1.677.497.020
16	319088	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Lancar	-	0,5%	176.497
	Jumlah			4.003.005.410		2.211.101.108

C.10 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.551.754.429,00 dan Rp8.362.015.409,00. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Satker		Debitur	Piutang	Jenis Sumber Piutang
	Nama				
020072	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar		Retno Ayu P, SP	98.352.836	- Kelebihan pembayaran kepada PT. Alfa Kreasi Utama atas kekurangan volume pekerjaan
029159	Dinas TPH Prov. Jawa Barat		Sigit E. Susili dan CV. Ori Bangun Lestari	2.571.798.777	- Penyaluran benih jagung tanpa sertifikat
059178	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		Catur Soegihartono, SP, MM	624.399.688	- Kelebihan pembayaran ongkos kirim pengadaan benih padi dan jagung TA 2020
079124	Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara		1. H. Suryadi	450.000.000	- Penyalahgunaan banpem kegiatan pengembangan kedelai tahun 2017
			2. Sutino	-	
119129	Dinas Pertanian Prov. Sumatera Selatan		Suprianto	109.900.000	- Bantuan benih padi tidak memenuhi mutu dan kualitas
239126	Dinas Pertanian TPH Prov. NTB		Lalu Syamsul Alam, SP	4.283.783	- Kelebihan pembayaran
249158	Dinas Pertanian Prov. NTT			12.235.295	- Anggaran yang tidak direalisasikan
269110	Dinas TP,Horti dan Bun Prov Bengkulu			699.545	- Kelebihan pembayaran ongkos kirim Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida
299336	Dinas Pert Prov. Banten		H. Asep Mulya Hidayat, SP. MM	0	- Kegiatan tidak dilaksanakan
299380	Dinas Pert Prov. Banten		Yulia Fatmawihartini, Taviara Suyarso, Dasep Setiawan, Muhlis	2.651.109.005	- Penyaluran benih jagung tidak lulus uji sertifikasi
319088	Dinas Pertanian Prov. Gorontalo		1.Ir. Asy'ari Hasiru 2. Jasin Mohammad, SE, MPA 3.Moch. Ridwan Nadjamuddin	18.975.500	- Dana Bansos tidak dilaksanakan
340141	Dinas TP,Horti dan Nak Prov Sulawesi Barat			0	- Pengadaan Benih Jagung Hibrida varietas Badan Litbang TA 2017 dan TA 2018 tidak sesuai spesifikasi kontrak
J u m l a h				6.551.754.429	

Kode	Uraian	Nilai
018.03.020072	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG JABAR	98.352.836,
018.03.029159	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	2.581.798.777,
018.03.059178	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	624.399.688,
018.03.079124	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	450.000.000,
018.03.119129	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	109.900.000,
018.03.239126	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.283.783,
018.03.249158	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	12.235.295,
018.03.269110	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	699.545,
018.03.299380	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.651.109.005,
018.03.319088	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	18.975.500,
Total		6.551.754.429,

C.11 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PAJANG LAINNYA

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(5.247.094.379,00) dan Rp(4.264.944.574,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing- masing piutang.

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing–masing sebesar Rp1.466.855.992.077,00 dan Rp1.637.848.270.962,00. **Tabel C.12** menunjukkan Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel C.12 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Tanah	1,259,764,248,577	1,403,737,174,577	- 143,972,926,000	-10.26%
2	Peralatan dan Mesin	431,949,687,589	542,420,355,088	- 110,470,667,499	-20.37%
3	Gedung dan Bangunan	200,771,665,145	211,838,054,712	- 11,066,389,567	-5.22%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,825,163,162	7,836,695,072	- 11,531,910	-0.15%
5	Aset Tetap Lainnya	2,893,357,950	5,464,606,150	- 2,571,248,200	-47.05%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	#DIV/0!
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-	#DIV/0!
	Jumlah	1,903,204,122,423	2,171,296,885,599	-268,092,763,176	-12.35%
	Akumulasi Penyusutan	436,348,130,346	533,448,614,637	- 97,100,484,291	-18.20%
	Nilai Buku	1,466,855,992,077	1,637,848,270,962	- 170,992,278,885	-10.44%

C.12 TANAH

Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.259.764.248.577,00 dan Rp1.403.737.174.577,00. Terdapat penurunan nilai aset Tanah, dikarenakan adanya koreksi hasil revaluasi aset dan belanja modal aset tanah. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.403.717.515.437
Mutasi Tambah	
Pembelian	232.145.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	39.963.000
Pengembangan Melalui KDP	8.000.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(144.250.034.000)
Saldo per 31 Desember 2023	1.259.747.589.437

Adapun rincian mutasi Tanah dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.13**.

Tabel C.13 Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal

Belanja Aset Tanah :	
Belanja Modal Tanah	232.145.000
Mutasi :	
Pembelian	232.145.000
Penyelesaian pembangunan langsung	-
Pengembangan langsung	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset	-
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	
Tercatat pada Pembelian Aset Tak Berwujud	-
Kesalahan Input yang seharusnya KDP diinput Pembelian Tanah	-

Mutasi kurang atas nilai tanah sebesar Rp138.000.571.000 berasal dari Transfer keluar sebanyak 1 bidang tanah bangunan kantor pemerintah seluas 4.336 M2 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 568 M2 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada BSIP.

C.13 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp431.949.687.589,00 dan Rp542.420.355.088,00. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	542,420,355,088.00
Saldo Awal	542,420,355,088.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	9,575,592,463.00
Perolehan Lainnya	292,431,100.00
Reklasifikasi Masuk	323,480,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-323,480,000.00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-132,740,000.00
Hibah Keluar	-10,282,779,139.00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-109,100,989,073.00
Transfer Keluar	-37,500,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-1,550,000.00
Penghapusan	-516,040,000.00
Koreksi Pencatatan	-267,092,850.00
Saldo per 31 Desember 2023	431,949,687,589.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-389,929,508,160.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	42,020,179,429.00

Sesuai tabel diatas bahwa terdapat penertiban aset yang sudah tidak digunakan lagi dalam operational kantor sebesar Rp. 109.100.989.073 sehingga dilakukan reklasifikasi ke aset henti guna untuk selanjutnya diproses penghapusan.

Adapun rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.14**.

Tabel C.14 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal

Belanja Aset Peralatan dan Mesin :	
Belanja Peralatan dan Mesin	9.442.792.463
Mutasi :	
Pembelian	9.575.592.463
Penyelesaian Nilai Aset	-
Pengembangan langsung	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset	9.575.592.463
Selisih	- 132.800.000
Penjelasan Selisih :	
Pembelian Ekstrakomptabel	0
BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM	-
Koreksi karena Pembelian Persediaan menggunakan Kode Barang Aset	- 132.800.000

C.14 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp200.771.665.145 dan Rp211.838.054.712,00. Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	211,838,054,712.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	588,884,183.00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	562,709,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	281,179,000.00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-6,986,616,750.00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-36,206,000.00
Hibah Keluar	-5,195,160,000.00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-281,179,000.00
Saldo per 31 Desember 2023	200,771,665,145.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-43,720,310,645.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	157,051,354,500.00

Pada tahun 2023 terdapat Transfer keluar terhadap nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.986.616.750, berasal dari:

- Transfer keluar sebanyak 1 unit berupa gedung tempat kerja lainnya permanen senilai Rp231.886.750 kepada Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
- Transfer keluar sebanyak 1 unit berupa gedung kantor permanen yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, DKI Jakarta, senilai Rp4.847.171.000 kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Transfer keluar sebanyak 1 unit berupa Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen yang beralamat di jln hortikultura, DKI Jakarta, senilai Rp1.907.559.000 kepada BSIP

Adapun rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.15**.

Tabel C.15 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal

Belanja Aset Gedung dan Bangunan :	
Belanja Gedung dan Bangunan	562.709.000
Mutasi :	
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	562.709.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset	562.709.000
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	-
Pembelian Ekstrakomptabel	-

C.15 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp7.825.163.162,00 dan Rp7.836.695.072,00. Tidak Terdapat penambahan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp 0. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	7.836.695.072,00
Mutasi tambah:	Rp	53.994.840
- Pembelian	Rp	53.994.840
Mutasi kurang:	Rp -	65.526.750
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp -	44.901.750
- Hibah Keluar	Rp -	20.625.000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	7.825.163.162
Akumulasi Penyusutan JJJ	Rp	2.695.311.541
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	5.129.851.621

Adapun rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.16**.

Tabel C.16 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal

Belanja Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.994.840
Mutasi :	
Pembelian	53.994.840
Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset	53.994.840
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	-
Perolehan/Pengembangan JIJ dari Belanja Barang	-

C.16 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.893.357.950,00 dan Rp5.464.606.150,00 tidak terdapat kenaikan ataupun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya. Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	5,464,606,150
Mutasi tambah:	Rp	199,128,000
- Perolehan Lainnya	Rp	199,128,000
- Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	2,770,376,200
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	29,376,200
- Transfer Keluar	Rp	2,741,000,000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2,893,357,950
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	3,000,000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	2,890,357,950

Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.770.376.200,00, berasal dari:

1. Terdapat mutasi kurang yang dikarenakan transfer keluar sebanyak 4 unit ATR senilai Rp2.741.000.000. Transfer ditujukan kepada Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
2. Terdapat mutasi kurang senilai Rp29.376.200,00 yang berasal dari transaksi henti guna BMN, dikarenakan BMN sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.16**.

Tabel C.16 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal

Mutasi Terkait Belanja :	
Pembelian INTRA	-
Pembelian EKSTRA	-
Total Mutasi Aset	-
Belanja Perolehan/Pengembangan ATL :	
Belanja Modal JIJ	-
Belanja Modal Lainnya	-
Total Belanja	-
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	

C.17 ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER

Aset Tetap yang Belum Diregister dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang Belum Diregister Pada umumnya akun aset tetap yang belum diregister di Neraca bersaldo disebabkan oleh kondisi seperti berikut ini: Terdapat Kuitansi/BAST yang belum dilakukan pendetilan di Modul Aset Tetap ,Terdapat Kuitansi/BAST yang tanggal Dokumennya berbeda periode dengan tanggal buku pendetilan Aset tetap, Terdapat Kuitansi/BAST yang dibuat namun tidak lanjutkan menjadi SPP dan tidak dihapus

.C.18 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(436.251.483.173,00) dan Rp(533.448.614.637,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.17.**

Tabel C.17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	1,259,764,248,577	-	1,259,764,248,577
2.	Peralatan dan Mesin	431,949,687,589	- 389,929,508,160	42,020,179,429
3.	Gedung dan Bangunan	200,771,665,145	- 43,720,310,645	157,051,354,500
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,825,163,162	- 2,695,311,541	5,129,851,621
5.	Aset Tetap Lainnya	2,893,357,950	- 3,000,000	2,890,357,950
Jumlah		1,903,204,122,423	- 436,348,130,346	1,466,855,992,077

ASET LAINNYA

C.19 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp829.931.779,00 dan Rp628.274.779,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tampak pada **Tabel C.18**.

Tabel C.18. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Software	Rp 631.656.779	Rp 590.586.779	Rp 41.070.000	6,95
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 198.275.000	Rp 37.688.000	Rp 160.587.000	426,10
Jumlah		Rp 829.931.779	Rp 628.274.779	Rp 201.657.000	32,10

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	628,274,779
Mutasi tambah:	Rp	238,620,000
Pembelian	Rp	238,620,000
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	36,963,000
Koreksi Pencatatan	Rp	36,963,000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	829,931,779
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	Rp	579,427,187
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	250,504,592

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.19 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal

Belanja Aset ATB:	
Belanja modal lainnya	238.620.000
Mutasi :	
Pembelian	238.620.000
Penyelesaian pembangunan langsung	-
Pengembangan langsung	-
Total Mutasi Aset	238.620.000
Selisih	-
Penjelasan Selisih :	
BM Lainnya untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain ATB	-

C.20 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp476.549.087.340,00 dan Rp0,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan pencatatan Belanja/Beban/Aset sehubungan dengan belanja menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pembayaran penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D-Penampungan.

Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat 88 kontrak dengan mekanisme RPATA yang seluruhnya telah dibayarkan pada Januari 2024.

PUSAT							
Keg.	Kontrak	Nilai (Rp.)	Pembayaran			Sisa Kontrak blm SP2D	
			SP2D	Kontrak	Nilai (Rp.)	Kontrak	Nilai (Rp.)
1761 AKABI	5	1,445,669,610	Januari	5	1,445,669,610	0	-
1762 SEREALIA	1	1,473,750,000		1	1,473,750,000	0	-
4579 PERBENIHAN	39	113,557,850,750		39	113,557,850,750	0	-
5885 PPHTP	43	360,071,816,980		43	360,071,816,980	0	-
Total	88	476,549,087,340		88	476,549,087,340	0	-

C.21 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp175.716.898.763,00 dan Rp72.772.932.090,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tampak pada **Tabel C.20**.

Tabel C.20 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Aset Tetap Henti Guna	Rp 175.337.662.269	Rp 71.947.816.596	Rp 103.389.845.673	143,70
Aset Tak Berwujud Henti Guna	Rp 379.236.494	Rp 825.115.494	Rp (445.879.000)	-54,04
Jumlah	Rp 175.716.898.763	Rp 72.772.932.090	Rp 102.943.966.673	89,66

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	72.772.932.090,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	109.175.267.023,00
Mutasi Kurang	
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-4.366.470.350,00
Hibah keluar BMN yang dihentikan	-41.370.000,00
Penghapusan	-1.823.460.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	175.716.898.763,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-166.220.600.329,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9.496.298.434,00

C.22 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(166.800.027.516,00) dan Rp(62.429.697.498,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Tabel C.21**.

Tabel C.21 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	Rp 631.656.779	Rp 579.427.187	Rp 52.229.592
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 198.275.000	Rp -	Rp 198.275.000
Jumlah		Rp 829.931.779	Rp 579.427.187	Rp 250.504.592
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 175.337.662.269	Rp 166.121.559.435	Rp 9.216.102.834
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 379.236.494	Rp 99.040.894	Rp 280.195.600
Jumlah		Rp 175.716.898.763	Rp 166.220.600.329	Rp 9.496.298.434
Total		Rp 176.546.830.542	Rp 166.800.027.516	Rp 9.746.803.026

Penambahan nilai aset tetap/ tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada tabel diatas disebabkan adanya usulan penghapusan aset tetap.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp440.551.137.921,00 dan Rp260.702.296,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada **Tabel C.22**.

Tabel C.22 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Utang Kepada Pihak Ketiga	440.551.137.921	241.514.296	440.309.623.625	182312,03
Uang Muka Dari KPPN	0	19.188.000	-19.188.000	-100,00
Jumlah	440.551.137.921	260.702.296	440.290.435.625	168886,29

C.23 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp440.551.137.921,00 dan Rp241.514.296,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, utang kepada pihak ketiga merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Perbandingan dan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Tabel C.23**

Tabel C.23 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 DES 2022	31 DES 2022	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	241.514.296	-241.514.296	-100,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	440.551.137.921,00	-	440.551.137.921	#DIV/0!
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-	0	#DIV/0!
4	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	-	0	#DIV/0!
5	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	-	0	#DIV/0!
Total		440.551.137.921	241.514.296	440.309.623.625	182.312,03

C.24 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga yang belum diajukan SPM dan SP2D.

C.25 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.188.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.26 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

EKUITAS

C.27 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.536.382.708.942,00 dan Rp1.708.565.036.602,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp7.139.183.924,00 dan Rp7.393.433.923,00. Dibandingkan tahun 2022, Pendapatan Bukan Pajak Lainnya tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp254.249.999,00 atau sebesar (3,44%). Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya disajikan pada **Tabel D.1**.

**Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan,	-3.724.508.500,	-4.210.109.700,	485.601.200	(11,53)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-23.090.000,	-15.847.000,	(7.243.000)	45,71
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	-36.000.000,	-6.750.000,	(29.250.000)	433,33
Pendapatan Perizinan Pertanian	-247.600.000,	0,	(247.600.000)	100,00%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	-1.522.435.359,	-1.624.831.667,	102.396.308	(6,30)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	0,	-151.192.000,	151.192.000	(100,00)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	-16.185.000,	-11.670.000,	(4.515.000)	38,69
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	-449.632.380,	-597.520.399,	147.888.019	(24,75)
Pendapatan Jasa Lainnya	-533.876.000,	-405.759.400,	(128.116.600)	31,57
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-8.291.268,	-3.638.250,	(4.653.018)	127,89
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-574.746.122,	-366.115.507,	(208.630.615)	56,98
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-2.819.295,	0,	(2.819.295)	100,00%
JUMLAH	(7.139.183.924)	(7.393.433.923)	254.249.999	(3,44)

Pendapatan di atas merupakan setoran ke Kas Negara atas pelaksanaan kegiatan dari Bulan Januari – Desember 2023. Dari Tabel D.1 dapat dilihat realisasi pendapatan terbesar per 31 Desember 2023 adalah Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya.

Adapun perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional disajikan pada **Tabel D.2**.

Tabel D.2 Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Berdasarkan LRA dan LO Per 31 Desember 2023

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
Pendapatan PNPB Lainnya			
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	3.724.508.500,	3.724.508.500,	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	442.586.509,		442.586.509
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	23.090.000,	23.090.000,	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	36.000.000,	36.000.000,	-
Pendapatan Perizinan Pertanian	247.600.000,	247.600.000,	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.522.435.359,	1.522.435.359,	-
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	16.185.000,	16.185.000,	-
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	449.632.380,	449.632.380,	-
Pendapatan Jasa Lainnya	533.876.000,	533.876.000,	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.291.268,	8.291.268,	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	43.266.000,	-	531.480.122
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	62.236.700,		62.236.700
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	586.035.021,		586.035.021
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	574.746.122,	574.746.122,	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	22.045.781,		22.045.781
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.442.314.836,		5.442.314.836
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.303.312,		5.303.312
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.424.700,		25.424.700
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.440.000,		4.440.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.819.295,	2.819.295,	-
JUMLAH	13.772.836.783	7.139.183.924	6.058.906.737

Pada **Tabel D.2** diatas terdapat perbedaan antara LRA Pendapatan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di LO sebesar Rp6.058.906.737,00.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 39.980.929.997,00 dan Rp 41.165.307.440,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada **Tabel D.3**.

Tabel D.3 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Gaji Pokok PNS	28.586.276.980,	29.267.191.420,	(680.914.440)	(2,33)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0,	-864.000,	857.391	(99,24)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji	-6.609,	-2.704,	(3.905)	144,42
Beban Pembulatan Gaji PNS	427.707,	440.820,	(13.113)	(2,97)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.042.529.188,	-3.375.300,	2.045.904.488	(60.614,00)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri	-297.924,	2.102.020.452,	(2.102.318.376)	(100,01)
Beban Tunj. Anak PNS	605.900.201,	618.938.027,	(13.037.826)	(2,11)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0,	-2.520.000,	2.520.000	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	451.935.000,	496.850.000,	(44.915.000)	(9,04)
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional	-13.120.000,	-9.191.000,	(3.929.000)	42,75
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.189.590.000,	2.819.992.000,	369.598.000	13,11
Beban Tunj. PPh PNS	164.800.230,	152.895.605,	11.904.625	7,79
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-217.260,	-724.200,	506.940	(70,00)
Beban Tunj. Beras PNS	1.612.431.300,	1.683.475.320,	(71.044.020)	(4,22)
Beban Uang Makan PNS	2.563.944.000,	2.901.025.000,	(337.081.000)	(11,62)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum	-11.285.250,	-390.000,	(10.895.250)	2.793,65
Beban Tunjangan Umum PNS	685.930.000,	833.730.000,	(147.800.000)	(17,73)
Beban Gaji Pokok PPPK	10.588.800,	0,	10.588.800	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	124,	0,	124	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000,	0,	1.400.000	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,	0,	289.680	100,00
Beban Uang Makan PPPK	1.645.000,	0,	1.645.000	100,00
Beban Uang Lembur	88.288.000,	305.816.000,	(217.528.000)	(71,13)
JUMLAH	39.980.929.997	41.165.307.440	(1.184.384.052)	(2,88)

Secara garis besar, beban pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode 31 Desember 2022 sebesar 2,88%. Hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah pegawai karena mutasi, pensiun atau meninggal dunia.

Terdapat selisih antara Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) sebesar (Rp4.440.000,00) disajikan pada **Tabel D.4**.

Tabel D.4 Perbandingan Belanja Pegawai Berdasarkan LRA dan LO Per 31 Desember 2023

URAIAN	Beban Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	28.586.276.980,	28.586.276.980,	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-6.609,	-6.609,	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	427.707,	427.707,	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.042.529.188,	2.042.529.188,	-
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-297.924,	-297.924,	-
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-119.170,	-119.170,	-
Belanja Tunj. Anak PNS	605.900.201,	605.900.201,	-
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0,	0,	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	451.935.000,	451.935.000,	-
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-13.120.000,	-13.120.000,	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.194.030.000,	3.189.590.000,	4.440.000
Belanja Tunj. PPh PNS	164.800.230,	164.800.230,	-
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-217.260,	-217.260,	-
Belanja Tunj. Beras PNS	1.612.431.300,	1.612.431.300,	-
Belanja Uang Makan PNS	2.563.944.000,	2.563.944.000,	-
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-11.285.250,	-11.285.250,	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	685.930.000,	685.930.000,	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	10.588.800,	10.588.800,	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124,	124,	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000,	1.400.000,	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,	289.680,	-
Belanja Uang Makan PPPK	1.645.000,	1.645.000,	-
Belanja Uang Lembur	88.288.000,00	88.288.000,	-
JUMLAH	39.985.369.997	39.980.929.997	4.440.000

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.025.303.924,00 dan Rp 12.872.191.881,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5 Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Persediaan konsumsi	8.064.909.050,	6.414.362.311,	1.650.546.739	25,73
Beban Persediaan bahan baku	3.565.094.568,	1.412.942.255,	2.152.152.313	152,32
Beban Persediaan Lainnya	395.300.306,	5.044.887.315,	(4.649.587.009)	(92,16)
JUMLAH	12.025.303.924	12.872.191.881	(846.887.957)	(6,58)

Dari **Tabel D.5**, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan TA 2022 terdapat penurunan atas beban persediaan karena turunnya pemakaian persediaan lainnya.

Tabel D.6 Perbandingan Beban Persediaan dengan Pemakaian Barang Persediaan per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Beban Persediaan	Pemakaian Barang Persediaan Berdasarkan SIMAKBMN (Rp)	Selisih
Beban Persediaan konsumsi	5.987.063.485	5.926.613.485	60.450.000
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	1.705.186.630	1.705.186.630	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	14.700.188.561	14.700.188.561	-
JUMLAH	22.392.438.676	22.331.988.676	60.450.000

Pada Tabel D.6 diatas dapat dilihat terdapat selisih pada Beban Persediaan Konsumsi, Beban Persediaan bahan baku dan Beban Persediaan Lainnya. Selisih tersebut dikarenakan adanya kesalahan kode barang pada saat penginputan pada aplikasi SAKTI.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp220.618.728.484,00 dan Rp212.117.545.619,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Dibandingkan TA 2022, terjadi kenaikan atas beban barang dan jasa sebesar 4,02%, adapun kenaikan terbesar terdapat pada Beban Barang Non Operasional Lainnya. Sementara nilai beban terendah terdapat pada Beban Sewa.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.7 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	12.163.686.708,	12.115.637.016,	48.049.692	0,40
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-365,	0	(365)	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	713.681.281,	304.961.300,	408.719.981	134,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	166.591.582,	136.992.390,	29.599.192	21,61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11.410.200.000,	13.028.101.000,	(1.617.901.000)	(12,42)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.080.233.697,	498.286.035,	581.947.662	116,79
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	120.235.423,	3.245.989.241,	(3.125.753.818)	(96,30)
Beban Bahan	35.145.542.791,	29.995.658.362,	5.149.884.429	17,17
Pengembalian Beban Bahan	0,	-28.750.000,	28.750.000	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	71.473.888.560,	72.619.058.148,	(1.145.169.588)	(1,58)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-1.285.000,	-19.850.000,	18.565.000	(93,53)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-842.659,	-21.956.630,	21.113.971	(96,16)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	52.049.272.345,	42.559.347.673,	9.489.924.672	22,30
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0,	234.246.701,	(234.246.701)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	3.193.399.951,	2.908.645.370,	284.754.581	9,79
Beban Langganan Telepon	246.880.419,	254.972.102,	(8.091.683)	(3,17)
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,	-38.607.583,	38.607.583	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.318.578.107,	1.335.687.837,	(17.109.730)	(1,28)
Beban Jasa Pos dan Giro	2.845.800,	3.930.000,	(1.084.200)	(27,59)
Beban Jasa Konsultan	580.477.000,	906.015.000,	(325.538.000)	(35,93)
Beban Sewa	7.028.625.990,	10.213.802.353,	(3.185.176.363)	(31,19)
Beban Jasa Profesi	7.891.260.100,	9.917.137.100,	(2.025.877.000)	(20,43)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-4.177.500,	-37.543.500,	33.366.000	(88,87)
Beban Jasa Lainnya	16.039.634.254,	11.857.181.311,	4.182.452.943	35,27
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0,	-6.370.000,	6.370.000	(100,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,	115.264.385,	(115.264.385)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,	19.710.008,		
TOTAL	220.618.728.484	212.117.545.619	8.520.892.873	4,02

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.021.507.702,00 dan Rp10.071.223.542,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8 Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.802.779.003,	4.124.677.452,	678.101.551	16,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.473.122.479,	4.388.662.462,	84.460.017	1,92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.999.000,	22.716.000,	28.283.000	124,51
Beban Pemeliharaan Jaringan	347.579.350,	434.246.000,	(86.666.650)	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	209.112.220,	146.102.000,	63.010.220	100,00
Beban Persediaan suku cadang	1.137.915.650,	937.910.173,	200.005.477	21,32
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,	16.909.455,	(16.909.455)	(100,00)
JUMLAH	11.021.507.702	10.071.223.542	950.284.160	9,44

Pada Tabel D.8 dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 9,44%, dengan kenaikan terbesar pada beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp228.073.724.763,00 dan Rp175.004.283.398,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	150.104.539.654,	115.288.394.737,	34.816.144.917	30,20
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-212.018.638,	-189.466.946,	(22.551.692)	11,90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.785.317.820,	4.659.011.000,	7.126.306.820	152,96
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-2.361.964,	-16.000,	(2.345.964)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.913.555.540,	4.758.299.350,	155.256.190	3,26
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	-790.500,	-2.836.000,	2.045.500	(72,13)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,	15.300.000,	(15.300.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.756.337.427,	49.961.683.976,	10.794.653.451	21,61
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	-163.284.456,	-187.442.535,	24.158.079	(12,89)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.145.056.820,	701.355.816,		
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-252.626.940,	0,	(252.626.940)	(100,00)
JUMLAH	228.073.724.763	175.004.283.398	52.625.740.361	30,07

Jika dibandingkan dengan TA 2022, terjadi kenaikan atas beban Perjalanan Dinas sebesar 30,07%. Adapun kenaikan terbesar pada Beban Perjalanan Biasa.

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.715.328.441.112,00 dan Rp2.437.617.384.260,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.10 Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pengembalian Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	-796.793.583,	0	(796.793.583)	100,00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	796.793.583,	579.291.000,	217.502.583	37,55
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	28.023.750.000,	34.411.921.000,	(6.388.171.000)	(18,56)
Pengembalian Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	-303.325.000,	-270.720.000,	(32.605.000)	12,04
Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	929.575.000,	270.720.000,	658.855.000	243,37
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang	0,	-135.036.500,	135.036.500	(100,00)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	9.582.416.500,	51.708.241.459,	(42.125.824.959)	(81,47)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada	0,	192.645.918.939,	(192.645.918.939)	(100,00)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan	329.159.500,	1.274.604.690,	(945.445.190)	(74,18)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	58.215.480.300,	55.205.273.550,	3.010.206.750	5,45
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	658.945.122.997,	417.531.662.783,	241.413.460.214	57,82
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	60.000.000,	77.517.000,	(17.517.000)	(22,60)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	1.959.546.261.815,	1.684.317.990.339,	275.228.271.476	16,34
JUMLAH	2.715.328.441.112	2.437.617.384.260	277.711.056.852	11,39

Jika dibandingkan dengan TA 2022, terdapat kenaikan atas Beban Barang dan Uang Bantuan Pemerintah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar 11,39%, hal ini disebabkan terdapat kesalahan pada penginputan Aplikasi pada tahun 2022.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp25.975.952.180,00 dan Rp27.981.270.152,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.11 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.549.422.571,	19.201.732.494,	(1.652.309.923)	(8,61)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.743.663.806,	8.030.060.396,	(286.396.590)	(3,57)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	138.061.293,	138.061.292,	1	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	111.688.443,	111.237.552,	450.891	0,41
Beban Penyusutan Jaringan	42.179.109,	42.179.106,	3	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	343.803.604,	394.653.999,	(50.850.395)	(12,88)
Jumlah penyusutan	25.928.818.826,	27.917.924.839,	-1.989.106.013,	(7,12)
Beban Amortisasi Software	47.133.354,	63.345.313,	(16.211.959)	(25,59)
Jumlah penyusutan	47.133.354,	63.345.313,	-16.211.959,	(25,59)
JUMLAH	25.975.952.180	27.981.270.152	(2.005.317.972)	(7,17)

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp912.470.169,00 dan (Rp17.417.086,00). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-31.524.690,	-528.946,	30.995.744	5860%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	943.994.859,	-16.888.140,	960.882.999	-5689,69%
Jumlah	912.470.169	- 17.417.086	929.887.255,00	-5338,94%

Jika dibandingkan dengan TA 2022, terdapat penurunan atas beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih jangka panjang sebesar 5.338,94%.

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.13 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	30 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(4.700.473.939,)	(235.824.409,)	(4.464.649.530)	1.893,21
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	442.586.509,	402.568.696,	40.017.813	9,94
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.143.060.448,	638.393.105,	4.504.667.343	705,63
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.879.546.270,	38.009.648.941,	(29.130.102.671)	(76,64)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.879.546.270,	58.129.405.271,	(49.249.859.001)	(84,72)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	20.119.756.330,	(20.119.756.330)	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.179.072.331	37.773.824.532	(33.594.752.201)	(88,94)

D.10.1 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan dan beban pelepasan aset non lancar. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar (Rp4.700.473.939,00) dan defisit (Rp235.824.409,00). Defisit Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp442.586.509,00 dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.143.060.448,00.

D.10.1.1 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp442.586.509,00 dan Rp402.568.696,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp40.017.813,00 atau 9,94% dibandingkan Tahun 2022.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel D.14 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	442.586.509,	398.368.696,	44.217.813	11,10
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		4.200.000,	(4.200.000)	(100,00)
JUMLAH	442.586.509	402.568.696	40.017.813	9,94

Tidak terdapat selisih antara realisasi pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan realisasi anggaran (LRA) periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan operasional (LO), seperti dapat dilihat pada **Tabel D.15**.

Tabel D.15 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023

URAIAN	LRA	LO	Selisih	% Naik (TURUN)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	442.586.509,	442.586.509,	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,	-	-	-
JUMLAH	442.586.509	442.586.509	-	-

D.10.1.2 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.143.060.448,00 dan Rp638.393.105,00. Beban ini naik sebesar Rp4.504.667.343,00 atau 705,63% dibanding Tahun 2022.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 tampak pada **Tabel D.16**.

Tabel D.16 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.143.060.448,	638.393.105	4.504.667.343	705,63
Jumlah	5.143.060.448	638.393.105	4.504.667.343	705,63

D.10.2. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.879.546.270,00 dan Rp38.009.648.941,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp29.130.102.671,00) atau -76,64% dibanding Tahun 2022. Surplus Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.879.546.270,00 dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

D.10.2.1 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.879.546.270,00 dan Rp58.129.405.271,00. Nilai tersebut turun sebesar (Rp49.249.859.001,00) atau -84,72% dibanding Tahun 2022. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 tampak pada **Tabel D.17**.

Tabel D.17 Perbandingan Pendapatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-1.374.698.582,	-21.122.000,	(1.353.576.582)	6.408,37
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-64.632.467,	-1.548.626.697,	1.483.994.230	(95,83)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	-22.045.781,	-18.879.075,	(3.166.706)	16,77
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-5.142.484.428,	-5.013.803.184,	(128.681.244)	2,57
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-5.303.312,	0,	(5.303.312)	(100,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-25.424.700,	0,	(25.424.700)	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-2.244.957.000,	-31.489.326.315,	29.244.369.315	(92,87)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,	-20.037.648.000,	20.037.648.000	(100,00)
Jumlah	-8.879.546.270,	-58.129.405.271,	49.249.859.001,	(84,72)

Jika Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.677.369.357,00, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel D.18 Perbandingan Pendapatan Non Operasional Lainnya Antara LRA dan LO per 31 Desember 2023

URAIAN	LRA	LO	Kenaikan (Penurunan)	Keterangan
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.291.268,	0,	8.291.268	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	43.266.000,	0,	43.266.000	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	62.236.700,	1.374.698.582,	(1.312.461.882)	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	586.035.021,	64.632.467,	521.402.554	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	22.045.781,	22.045.781,	-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.442.314.836,	5.142.484.428,	299.830.408	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.303.312,	5.303.312,	-	
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.424.700,	25.424.700,	-	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		2.244.957.000,	(2.244.957.000)	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.440.000,	0,	4.440.000	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.819.295,	0,	2.819.295	
	6.202.176.913	8.879.546.270	(2.677.369.357)	

Pada **Tabel D.18** dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya antara LRA dan LO disebabkan karena jurnal penyesuaian saat perlakuan akrual atas piutang dan kas lain di bendahara pengeluaran, serta selisih pada pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan dikarenakan jurnal kiriman dari Modul Aset dan Modul Persediaan.

D.10.2.2 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp20.119.756.330,00. Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya berupa Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, mengalami penurunan sebesar (Rp20.119.756.330,00) atau -100,00% dibandingkan Tahun 2022. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.19 Perbandingan Beban Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (TURUN)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,	20.119.756.330	(20.119.756.330)	(100,00)
Jumlah	-	20.119.756.330	(20.119.756.330)	-100,00%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.708.565.036.602,00 dan Rp2.736.009.931.019,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(3.242.618.802.076,00) dan Rp(2.871.644.530.751,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir periode tahun berjalan. Saldo Penyesuaian Nilai Aset periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2,00) dan Rp(18.109.866.769,00).

E.3.3 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp698.745.875,00.

E.3.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(593.664.697,00) dan Rp(2.167.489.125,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

KODE	NMSATKER	31 Desember 2023
129065	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	466.665
238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	593.198.032
TOTAL		593.664.697

KODE SATKER	DESKRIPSI	31 Desember 2023
238251	Hibah Keluar Pompa Air	382.114.032
238251	Hibah Keluar Selang Air	69.300.000
238251	Koreksi Pencatatan Meubelair Lainnya	140.294.000
238251	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Laser Pointer	1.490.000
129065	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Serial Scanner/Printer	466.665
Total		593.664.697

E.3.6 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2.080.386.509,00) dan Rp(184.547.555.793,00)., dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Satker	31 Desember 2023
Koreksi Lainnya	079124 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	- 204.269.000
Koreksi Lainnya	239126 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.000.000
Koreksi Lainnya	269110 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	- 3.498
Koreksi Lainnya	239126 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	- 1.878.114.011
Total		- 2.080.386.509

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.058.752.811.894,00 dan Rp2.048.325.802.146,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.2. Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.224.389.009.145,	2.224.894.501.644,	44,92%
Diterima dari Entitas Lain	-13.772.836.783,	-13.733.863.271,	0,28%
Transfer Keluar	-151.863.360.468,	-171.539.835.712,	-11,47%
Transfer Masuk	0,	7.961.930.737,	-100,00%
Pengesahan Hibah Langsung	0,	849.579.969,	-100,00%
TOTAL	3.058.752.811.894	2.048.432.313.367	49,32%

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN), yang mana per 31 Desember 2023, DKEL sebesar 3.224.389.009.145,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(13.772.836.783,00).

E.4.2 TRANSFER MASUK/ TRANSFER KELUAR

Saldo transfer keluar disajikan sebesar Rp(151,863,360,468,00) dan transfer masuk sebesar Rp0,00. Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Adapun rincian transfer keluar sebagai berikut:

KODE	NMSATKER	RPHREAL
018.03.238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	(151.863.360.468.)
TOTAL		(151.863.360.488.)

NO.	KODE BARANG	DESKRIPSI	31 Desember 2023
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	- 138.000.571.000
2	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	- 6.249.463.000
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	- 4.847.171.000
	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.876.324.260
4	4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	- 1.907.559.000
	4010201001	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	260.121.684
5	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	- 231.886.750
	4010130001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	11.594.338
6	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	- 2.741.000.000
7	3050204004	A.C. Split	- 37.500.000
	3050204004	Akumulasi Penyusutan A.C. Split	3.750.000
Total			- 33.750.000

1. Transfer keluar sebanyak 1 bidang tanah bangunan kantor pemerintah seluas 4.336 M2 senilai Rp138.000.571.000 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Transfer keluar sebanyak 1 bidang tanah bangunan mess/wisma/asrama seluas 568 M2 senilai Rp6.249.463.000 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke BSIP.
3. Transfer keluar sebanyak 1 unit gedung kantor permanen senilai Rp 4.847.171.000 dengan akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(1.876.324.260,00) kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Transfer keluar sebanyak 1 unit rumah negara golongan I tipe A permanen senilai Rp1.907.559.000 dengan akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(260.121.684) kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
5. Transfer keluar sebanyak 1 unit gedung tempat kerja lainnya permanen senilai Rp231.886.750 dengan akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(11.594.338) kepada Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
6. Transfer keluar sebanyak 4 unit ATR senilai Rp2.741.000.000. Transfer ditujukan kepada Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
7. Transfer Keluar Peralatan dan mesin senilai Rp37.500.000,00 dengan akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(3.750.000,00).

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.522.024.995.212,00 dan Rp1.708.565.036.602,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seluruh kontrak dengan mekanisme RPATA senilai Rp476.549.087.340,00 seluruhnya telah dibayarkan pada Januari 2024.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Sampai dengan periode pelaporan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (340070) terdapat Saldo Akun Tidak Normal atas selisih kurang catat pada beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (593124) senilai Rp.7.620.000,00 dikarenakan Satker salah melakukan jurnal koreksi.
2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2023 mengelola Belanja Subsidi Benih berasal dari Bagian Anggaran 999.07 dengan nilai aset sebesar Rp0,00 terdiri atas Piutang Bukan Pajak Rp12.453.015.134,00 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi (Rp12.453.015.134,00), yang mana sejak tahun 2018 tidak lagi menerima alokasi belanja subsidi benih.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2023 mengelola Cadangan Benih Nasional (CBN) berasal dari Bagian Anggaran 999.08 dengan nilai aset sebesar Rp0,00 terdiri atas Piutang Bukan Pajak senilai Rp289.012.730.310,00; Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak senilai (Rp289.012.730.310,00). Sejak TA. 2013 tidak lagi menerima alokasi belanja lain-lain.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN TANAMAN PANGAN 03**

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 22/05/24 11:27 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,409,242,955,000	3,224,389,009,145	(184,853,945,855)	95	2,279,320,454,000	2,224,894,501,644	(54,425,952,356)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:27 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	19,188,000	(19,188,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	326,405,712	765,962,180	(439,556,468)	(57.39)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,839,375,520	3,576,022,375	(1,736,646,855)	(48.56)
Piutang Bukan Pajak	372,002,693	374,496,226	(2,493,533)	(0.67)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(243,937,226)	(243,937,226)	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	128,065,467	130,559,000	(2,493,533)	(1.91)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	252,404,318	252,404,318	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(252,404,318)	(252,404,318)	0	0.00
Persediaan	18,717,959,081	50,172,599,308	(31,454,640,227)	(62.69)
JUMLAH ASET LANCAR	21,011,805,780	54,664,330,863	(33,652,525,083)	(61.56)
ASET TETAP				
Tanah	1,259,764,248,577	1,403,737,174,577	(143,972,926,000)	(10.26)
Peralatan dan Mesin	431,949,687,589	542,420,355,088	(110,470,667,499)	(20.37)
Gedung dan Bangunan	200,771,665,145	211,838,054,712	(11,066,389,567)	(5.22)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,825,163,162	7,836,695,072	(11,531,910)	(0.15)
Aset Tetap Lainnya	2,893,357,950	5,464,606,150	(2,571,248,200)	(47.05)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(436,348,130,346)	(533,448,614,637)	97,100,484,291	(18.20)
JUMLAH ASET TETAP	1,466,855,992,077	1,637,848,270,962	(170,992,278,885)	(10.44)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,003,005,410	11,963,678,512	(7,960,673,102)	(66.54)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,211,101,108)	(10,719,121,645)	8,508,020,537	(79.37)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	1,791,904,302	1,244,556,867	547,347,435	43.98
Piutang Jangka Panjang lainnya	6,551,754,429	8,362,015,409	(1,810,260,980)	(21.65)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(5,247,094,379)	(4,264,944,574)	(982,149,805)	23.03
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	1,304,660,050	4,097,070,835	(2,792,410,785)	(68.16)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	3,096,564,352	5,341,627,702	(2,245,063,350)	(42.03)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	829,931,779	628,274,779	201,657,000	32.10
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	476,549,087,340	0	476,549,087,340	0.00
Aset Lain-lain	175,716,898,763	72,772,932,090	102,943,966,673	141.46
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(166,800,027,516)	(62,429,697,498)	(104,370,330,018)	167.18
JUMLAH ASET LAINNYA	486,295,890,366	10,971,509,371	475,324,380,995	4,332.35
JUMLAH ASET	1,977,260,252,575	1,708,825,738,898	268,434,513,677	15.71
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:27 AM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Utang kepada Pihak Ketiga	440,551,137,921	241,514,296	440,309,623,625	182,312.03
Uang Muka dari KPPN	0	19,188,000	(19,188,000)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	326,405,712	0	326,405,712	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	440,877,543,633	260,702,296	440,616,841,337	169,011.49
JUMLAH KEWAJIBAN	440,877,543,633	260,702,296	440,616,841,337	169,011.49
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,536,382,708,942	1,708,565,036,602	(172,182,327,660)	(10.08)
JUMLAH EKUITAS	1,536,382,708,942	1,708,565,036,602	(172,182,327,660)	(10.08)
JUMLAH EKUITAS	1,536,382,708,942	1,708,565,036,602	(172,182,327,660)	(10.08)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,977,260,252,575	1,708,825,738,898	268,434,513,677	15.71

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 04/06/24 11:25 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,139,183,924	7,393,433,923	(254,249,999)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,139,183,924	7,393,433,923	(254,249,999)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	7,139,183,924	7,393,433,923	(254,249,999)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	39,980,929,997	41,165,307,440	(1,184,377,443)	-
Beban Persediaan	12,025,303,924	12,872,191,881	(846,887,957)	-
Beban Barang dan Jasa	220,620,724,484	212,117,545,619	8,503,178,865	-
Beban Pemeliharaan	10,243,857,269	10,071,223,542	172,633,727	-
Beban Perjalanan Dinas	228,073,724,763	175,004,283,398	53,069,441,365	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2,702,838,028,142	2,437,617,384,260	265,220,643,882	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 04/06/24 11:25 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	25,985,725,565	27,981,270,152	(1,995,544,587)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	912,470,169	(17,417,086)	929,887,255	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	3,240,680,764,313	2,916,811,789,206	323,868,975,107	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,233,541,580,389)	(2,909,418,355,283)	(324,123,225,106)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(4,700,473,939)	(235,824,409)	(4,464,649,530)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	442,586,509	402,568,696	40,017,813	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5,143,060,448	638,393,105	4,504,667,343	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,067,839,770	38,009,648,941	(27,941,809,171)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,067,839,770	58,129,405,271	(48,061,565,501)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	20,119,756,330	(20,119,756,330)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,367,365,831	37,773,824,532	(32,406,458,701)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,228,174,214,558)	(2,871,644,530,751)	(356,529,683,807)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,228,174,214,558)	(2,871,644,530,751)	(356,529,683,807)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:25 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,708,565,036,602	2,736,009,931,019	(1,027,444,894,417)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,228,174,214,558)	(2,871,644,530,751)	(356,529,683,807)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,760,924,996)	(204,126,165,812)	201,365,240,816	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(2)	(18,109,866,769)	18,109,866,767	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	698,745,875	(698,745,875)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(680,538,485)	(2,167,489,125)	1,486,950,640	-
LAIN-LAIN	(2,080,386,509)	(184,547,555,793)	182,467,169,284	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,058,752,811,894	2,048,325,802,146	1,010,427,009,748	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(172,182,327,660)	(1,027,444,894,417)	855,262,566,757	-
EKUITAS AKHIR	1,536,382,708,942	1,708,565,036,602	(172,182,327,660)	-

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/05/24 11:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	2,768,625,000	3,724,508,500	0	3,724,508,500	134.53
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	350,000,000	442,586,509	0	442,586,509	126.45
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,370,000	23,090,000	0	23,090,000	150.23
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,000,000	36,000,000	0	36,000,000	600
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	3,139,995,000	4,226,185,009	0	4,226,185,009	134.59
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	600,000	247,600,000	0	247,600,000	41266.67
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,696,150,000	1,522,435,359	0	1,522,435,359	89.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,696,750,000	1,770,035,359	0	1,770,035,359	104.32
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	16,185,000	0	16,185,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	0	16,185,000	0	16,185,000	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	734,400,000	449,632,380	0	449,632,380	61.22
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	507,082,000	533,876,000	0	533,876,000	105.28
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	1,241,482,000	983,508,380	0	983,508,380	79.22
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	8,291,268	0	8,291,268	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	43,266,000	0	43,266,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	62,236,700	0	62,236,700	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	586,035,021	0	586,035,021	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	699,828,989	0	699,828,989	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/05/24 11:31 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	574,746,122	0	574,746,122	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	574,746,122	0	574,746,122	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,045,781	0	22,045,781	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,442,314,836	0	5,442,314,836	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,303,312	0	5,303,312	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	25,424,700	0	25,424,700	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,440,000	0	4,440,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,819,295	0	2,819,295	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,502,347,924	0	5,502,347,924	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,078,227,000	13,772,836,783	0	13,772,836,783	226.59
	JUMLAH PENDAPATAN	6,078,227,000	13,772,836,783	0	13,772,836,783	226.59

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/05/24 11:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,110,334,000	28,605,089,000	28,586,276,980	0	28,586,276,980	99.93	18,812,020
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	648,000	457,000	427,707	6,609	421,098	92.14	35,902
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,688,488,000	2,118,356,000	2,042,529,188	297,924	2,042,231,264	96.41	76,124,736
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	638,984,000	608,868,000	605,900,201	119,170	605,781,031	99.49	3,086,969
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,065,577,000	535,935,000	451,935,000	0	451,935,000	84.33	84,000,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,563,640,000	3,647,211,000	3,194,030,000	13,120,000	3,180,910,000	87.21	466,301,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	116,995,000	166,829,000	164,800,230	0	164,800,230	98.78	2,028,770
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,614,937,000	1,625,105,000	1,612,431,300	217,260	1,612,214,040	99.21	12,890,960
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,581,118,000	3,004,854,000	2,563,944,000	0	2,563,944,000	85.33	440,910,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	978,591,000	716,287,000	685,930,000	11,285,250	674,644,750	94.19	41,642,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	45,359,312,000	41,028,991,000	39,908,204,606	25,046,213	39,883,158,393	97.21	1,145,832,607
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	53,296,000	10,588,800	0	10,588,800	19.87	42,707,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	22,000	124	0	124	0.56	21,876
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	5,420,000	0	0	0	0	5,420,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,140,000	0	0	0	0	3,140,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	5,940,000	1,400,000	0	1,400,000	23.57	4,540,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,220,000	289,680	0	289,680	5.55	4,930,320
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	14,208,000	1,645,000	0	1,645,000	11.58	12,563,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	87,246,000	13,923,604	0	13,923,604	15.96	73,322,396
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	5,072,162,000	108,054,000	88,288,000	0	88,288,000	81.71	19,766,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	5,072,162,000	108,054,000	88,288,000	0	88,288,000	81.71	19,766,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512412	Belanja Pegawai Transito	52,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	52,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	50,483,974,000	41,224,291,000	40,010,416,210	25,046,213	39,985,369,997	96.99	1238921003
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,061,851,000	12,343,729,000	12,163,686,708	365	12,163,686,343	98.54	180,042,657
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	544,920,000	716,699,000	713,681,281	0	713,681,281	99.58	3,017,719
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	414,874,000	239,699,000	166,591,582	0	166,591,582	69.5	73,107,418
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,053,830,000	11,902,990,000	11,410,200,000	0	11,410,200,000	95.86	492,790,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/05/24 11:30 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGENBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	913,580,000	1,080,343,000	1,072,267,195	0	1,072,267,195	99.25	8,075,805
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	541,638,000	130,656,000	128,201,925	0	128,201,925	98.12	2,454,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,530,693,000	26,414,116,000	25,654,628,691	365	25,654,628,326	97.12	759,487,674
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	37,525,452,000	38,031,788,000	35,168,592,791	0	35,168,592,791	92.47	2,863,195,209
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	80,973,485,000	72,077,244,000	71,473,888,560	1,285,000	71,472,603,560	99.16	604,640,440
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	63,338,029,000	58,533,902,000	51,276,557,966	842,659	51,275,715,307	87.6	7,258,186,693
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	131,400,000	13,662,000	13,652,199	0	13,652,199	99.93	9,801
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	181,968,366,000	168,656,596,000	157,932,691,516	2,127,659	157,930,563,857	93.64	10,726,032,143
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,548,334,000	6,036,918,000	5,942,955,649	0	5,942,955,649	98.44	93,962,351
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	1,392,515,000	1,571,900,000	1,571,264,342	0	1,571,264,342	99.96	635,658
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	5,665,000,000	3,930,050,000	3,928,782,975	0	3,928,782,975	99.97	1,267,025
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,523,029,000	1,453,121,000	1,450,374,200	0	1,450,374,200	99.81	2,746,800
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	58,332,000	6,495,000	6,494,960	0	6,494,960	100	40
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	15,187,210,000	12,998,484,000	12,899,872,126	0	12,899,872,126	99.24	98,611,874
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,616,000,000	3,184,680,000	3,184,414,269	0	3,184,414,269	99.99	265,731
522112	Belanja Langganan Telepon	1,893,992,000	248,485,000	246,829,816	0	246,829,816	99.33	1,655,184
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,464,540,000	1,325,539,000	1,318,578,107	0	1,318,578,107	99.47	6,960,893
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	9,117,000	4,680,000	2,845,800	0	2,845,800	60.81	1,834,200
522131	Belanja Jasa Konsultan	240,000,000	594,000,000	580,477,000	0	580,477,000	97.72	13,523,000
522141	Belanja Sewa	6,472,644,000	7,805,169,000	7,028,625,990	0	7,028,625,990	90.05	776,543,010
522151	Belanja Jasa Profesi	9,067,500,000	9,173,080,000	7,891,260,100	4,177,500	7,887,082,600	85.98	1,285,997,400
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,907,589,000	16,585,489,000	16,031,534,254	0	16,031,534,254	96.66	553,954,746
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	37,671,382,000	38,921,122,000	36,284,565,336	4,177,500	36,280,387,836	93.22	2,640,734,164
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,423,325,000	4,828,903,000	4,802,779,003	0	4,802,779,003	99.46	26,123,997
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,656,129,000	4,527,065,000	4,473,122,479	0	4,473,122,479	98.81	53,942,521
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	51,000,000	50,999,000	0	50,999,000	100	1,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	500,000,000	347,590,000	347,579,350	0	347,579,350	100	10,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	9,589,454,000	9,754,558,000	9,674,479,832	0	9,674,479,832	99.18	80,078,168
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	146,610,603,000	156,965,044,000	150,050,859,654	212,018,638	149,838,841,016	95.46	7,126,202,984
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,383,790,000	12,840,255,000	11,806,397,820	2,361,964	11,804,035,856	91.93	1,036,219,144
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,595,726,000	5,426,299,000	4,922,055,540	790,500	4,921,265,040	90.69	505,033,960

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/05/24 11:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	27,000,000	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	65,072,790,000	64,648,023,000	60,756,337,427	163,284,456	60,593,052,971	93.73	4,054,970,029
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	225,689,909,000	239,881,871,000	227,537,900,441	378,455,558	227,159,444,883	94.7	12,722,426,117
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,508,041,000	1,145,065,000	1,145,056,820	252,626,940	892,429,880	77.94	252,635,120
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	2,508,041,000	1,145,065,000	1,145,056,820	252,626,940	892,429,880	77.94	252,635,120
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	495,054,898,000	635,346,882,000	628,744,786,844	796,793,583	627,947,993,261	98.84	7,398,888,739
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	400,000,000	250,000,000	249,850,000	0	249,850,000	99.94	150,000
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	51,652,000,000	28,000,000,000	27,640,000,000	0	27,640,000,000	98.71	360,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	547,106,898,000	663,596,882,000	656,634,636,844	796,793,583	655,837,843,261	98.83	7,759,038,739
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan							
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk	0	34,840,000	34,840,000	0	34,840,000	100	0
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk	0	19,300,000	19,300,000	0	19,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	0	54,140,000	54,140,000	0	54,140,000	100	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	1,864,405,765,000	2,186,880,421,000	2,038,663,556,844	303,325,000	2,038,360,231,844	93.21	148,520,189,156
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	19,118,635,000	8,888,965,000	8,853,481,000	0	8,853,481,000	99.6	35,484,000
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	3,750,000,000	0	0	0	0	0	0
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	1,351,500,000	267,875,000	267,875,000	0	267,875,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	1,888,625,900,000	2,196,037,261,000	2,047,784,912,844	303,325,000	2,047,481,587,844	93.24	148,555,673,156
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,933,877,853,000	3,357,460,095,000	3,175,602,884,450	1,737,506,605	3,173,865,377,845	94.53	183594717155
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	232,145,000	232,145,000	232,145,000	0	232,145,000	100	0
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	25,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	263,145,000	240,145,000	240,145,000	0	240,145,000	100	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,508,689,000	9,462,795,000	9,442,852,463	60,000	9,442,792,463	99.79	20,002,537
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	12,508,689,000	9,462,795,000	9,442,852,463	60,000	9,442,792,463	99.79	20,002,537
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198,250,000	238,144,000	237,848,000	0	237,848,000	99.88	296,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,180,000,000	324,865,000	324,861,000	0	324,861,000	100	4,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	3,378,250,000	563,009,000	562,709,000	0	562,709,000	99.95	300,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN TANAMAN PANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/05/24 11:30 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	54,000,000	53,994,840	0	53,994,840	99.99	5,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	54,000,000	53,994,840	0	53,994,840	99.99	5,160
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	238,620,000	238,620,000	0	238,620,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	238,620,000	238,620,000	0	238,620,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	16,150,084,000	10,558,569,000	10,538,321,303	60,000	10,538,261,303	99.81	20307697
	JUMLAH BELANJA	3,000,511,911,000	3,409,242,955,000	3,226,151,621,963	1,762,612,818	3,224,389,009,145	94.58	184,853,945,855

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	326,405,712	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,839,375,520	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	214,044,876	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	157,957,817	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	27,200,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	225,204,318	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	214,044,876
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	29,892,350
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	27,200,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	225,204,318
0.0	117111	Barang Konsumsi	296,473,175	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,430,000	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5,312,720,500	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	12,346,127,950	0
0.0	117131	Bahan Baku	601,320,197	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	158,887,259	0
0.0	131111	Tanah	1,259,764,248,577	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	431,949,687,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	200,771,665,145	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,071,351,400	0
0.0	134112	Irigasi	5,145,565,791	0
0.0	134113	Jaringan	1,608,245,971	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,434,224,125	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	459,133,825	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	389,929,508,160
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	43,720,310,645
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	933,290,107
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,019,404,703
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	742,616,731
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,000,000
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,003,005,410	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	6,551,754,429	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2,211,101,108
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	5,247,094,379
0.0	162151	Software	631,656,779	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	198,275,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	476,549,087,340	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	175,337,662,269	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	379,236,494	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	166,121,559,435
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	579,427,187
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	99,040,894
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	440,551,137,921
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	326,405,712
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,224,389,009,145
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,772,836,783	0
0.0	313211	Transfer Keluar	151,863,360,468	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,708,565,036,602
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	2	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	643,575,485	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	36,963,000	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,080,386,509	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	3,724,508,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	442,586,509
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	23,090,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	36,000,000
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	247,600,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,522,435,359
3.0	425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	16,185,000
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	449,632,380
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	533,876,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	8,291,268
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	1,374,698,582
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	64,632,467
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	574,746,122
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,045,781
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,142,484,428
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,303,312
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	25,424,700
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,819,295
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	3,433,250,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	28,586,276,980	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	421,098	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,042,231,264	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	605,781,031	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	451,935,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,176,470,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	164,800,230	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,612,214,040	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,563,944,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	674,644,750	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	124	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,645,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	88,288,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,163,686,343	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	713,681,281	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	166,591,582	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11,410,200,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,080,233,697	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	120,235,423	0
3.0	521211	Beban Bahan	35,145,542,791	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	71,472,603,560	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	52,048,429,686	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,193,399,951	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	246,880,419	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,318,578,107	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2,845,800	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	580,477,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	7,028,625,990	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,887,082,600	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,039,634,254	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,025,128,570	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,473,122,479	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,999,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	347,579,350	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	149,892,521,016	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,782,955,856	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,912,765,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,593,052,971	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	892,429,880	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	26,404,374,480	0
3.0	526311	Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	626,250,000	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	9,582,416,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17,539,127,511	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,763,732,251	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	138,061,293	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	111,688,443	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	42,179,109	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	47,133,354	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	343,803,604	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,064,909,050	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	209,112,220	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,137,915,650	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	329,159,500	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	58,215,480,300	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	658,952,742,997	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	60,000,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,948,667,604,365	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	3,565,094,568	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	395,300,306	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	31,524,690
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	943,994,859	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,996,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	5,143,060,448	0
JUMLAH			6,002,615,419,166	6,002,615,419,166

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,224,389,009,145
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,772,836,783	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	3,724,508,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	442,586,509
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	23,090,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	36,000,000
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	247,600,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,522,435,359
3.0	425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	16,185,000
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	449,632,380
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	533,876,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	8,291,268
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	43,266,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	62,236,700
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	586,035,021
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	574,746,122
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,045,781
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,442,314,836
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,303,312
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	25,424,700
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,440,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,819,295
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,586,276,980	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	427,707	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,042,529,188	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	605,900,201	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	451,935,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,194,030,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	164,800,230	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,612,431,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,563,944,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	685,930,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289,680	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,645,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	88,288,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,163,686,708	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	713,681,281	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	166,591,582	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,410,200,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,072,267,195	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	128,201,925	0
3.0	521211	Belanja Bahan	35,168,592,791	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	71,473,888,560	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	51,276,557,966	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13,652,199	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,942,955,649	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	1,571,264,342	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	3,928,782,975	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,450,374,200	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	6,494,960	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,184,414,269	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	246,829,816	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,318,578,107	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,845,800	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	580,477,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	7,028,625,990	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,891,260,100	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	16,031,534,254	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,802,779,003	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,473,122,479	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,999,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	347,579,350	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,050,859,654	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,806,397,820	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,922,055,540	0
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2,250,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,756,337,427	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,145,056,820	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	628,744,786,844	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	249,850,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	27,640,000,000	0
3.0	526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	34,840,000	0
3.0	526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	19,300,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,038,663,556,844	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	8,853,481,000	0
3.0	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	267,875,000	0
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	232,145,000	0
3.0	531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	6,000,000	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	2,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,442,852,463	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237,848,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	324,861,000	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	53,994,840	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	238,620,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,609
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	297,924
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	119,170
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	13,120,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	217,260
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	11,285,250
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	365
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,285,000
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	842,659
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,177,500
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	212,018,638
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,361,964
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	790,500
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	163,284,456
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	252,626,940
3.1	526112	Pengembalian Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	796,793,583
3.1	526311	Pengembalian Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	303,325,000
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	60,000
JUMLAH			3,239,924,458,746	3,239,924,458,746

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 22/05/24 11:28 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_es1

Keterangan :

FINAL

DATA KONTRAK DENGAN MEKANISME RPATA

NO	NOMOR KONTRAK	TOTAL NILAI KONTRAK	NILAI KONTRAK SUDAH DIBAYARKAN	NILAI TERMIN RPATA	NILAI SP2D PENAMPUNGAN	NILAI SP2D PEMBAYARAN	SISA SALDO RPATA	LANJUT TA BERIKUTNYA
1	'035OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016786/0/1	100.080.000	-	100.080.000	100.080.000	100.080.000	-	Tidak
2	'036OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016667/0/0	187.050.000	-	187.050.000	187.050.000	187.050.000	-	Tidak
3	'037OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016669/0/0	141.900.000	-	141.900.000	141.900.000	141.900.000	-	Tidak
4	'038OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016668/0/0	114.487.500	-	114.487.500	114.487.500	114.487.500	-	Tidak
5	'040OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/12/2023 A/139.23017126/0/1	17.260.155.000	-	17.260.155.000	17.260.155.000	17.260.155.000	-	Tidak
6	'045OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016676/0/0	780.000.000	-	780.000.000	780.000.000	780.000.000	-	Tidak
7	'050OP.BENIH.PL/HK-PPK/12/2023 A/139.23016690/0/0	199.950.000	-	199.950.000	199.950.000	199.950.000	-	Tidak
8	'052OP.BENIH.PL/HK-PPK/12/2023 A/139.23016693/0/0	188.017.500	-	188.017.500	188.017.500	188.017.500	-	Tidak
9	'054OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016779/0/1	195.000.000	-	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	Tidak
10	'055OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016781/0/1	419.156.250	-	419.156.250	419.156.250	419.156.250	-	Tidak
11	'057OP.BENIH.PL/HK-PPK/12/2023 A/139.23017050/0/0	130.325.000	-	130.325.000	130.325.000	130.325.000	-	Tidak
12	'064OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016829/0/1	154.700.000	-	154.700.000	154.700.000	154.700.000	-	Tidak
13	'066GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23015016/0/1	388.375.000	-	388.375.000	388.375.000	388.375.000	-	Tidak
14	'066OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23017055/0/0	426.620.000	-	426.620.000	426.620.000	426.620.000	-	Tidak
15	'076GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23015596/0/2	1.476.623.750	-	1.476.623.750	1.476.623.750	1.476.623.750	-	Tidak
16	'080GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23015943/0/1	673.400.000	-	673.400.000	673.400.000	673.400.000	-	Tidak
17	'087GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016232/0/1	2.590.000.000	-	2.590.000.000	2.590.000.000	2.590.000.000	-	Tidak
18	'088GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016480/0/0	125.615.000	-	125.615.000	125.615.000	125.615.000	-	Tidak
19	'091GE.Benh/HK-PD/SPK-PPK/12/2023 A/139.23016785/0/0	260.000.000	-	260.000.000	260.000.000	260.000.000	-	Tidak
20	'100/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016727/0/0	1.119.210.000	-	1.119.210.000	1.119.210.000	1.119.210.000	-	Tidak
21	'101/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016789/0/0	8.383.600.000	-	8.383.600.000	8.383.600.000	8.383.600.000	-	Tidak
22	'102/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016790/0/0	693.200.000	-	693.200.000	693.200.000	693.200.000	-	Tidak
23	'103/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016791/0/0	789.600.000	-	789.600.000	789.600.000	789.600.000	-	Tidak
24	'104/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016792/0/0	71.288.536.420	-	71.288.536.420	71.288.536.420	71.288.536.420	-	Tidak
25	'105/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016793/0/0	22.000.000.000	-	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	-	Tidak
26	'106/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016794/0/0	4.875.400.000	-	4.875.400.000	4.875.400.000	4.875.400.000	-	Tidak
27	'109/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016797/0/0	34.400.484.040	-	34.400.484.040	34.400.484.040	34.400.484.040	-	Tidak
28	'110/PPHTP/KONTRAK.12/2023 A/139.23016798/0/0	5.231.780.000	-	5.231.780.000	5.231.780.000	5.231.780.000	-	Tidak
29	'111/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016799/0/0	11.223.410.000	-	11.223.410.000	11.223.410.000	11.223.410.000	-	Tidak
30	'113/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016823/0/0	33.710.131.450	-	33.710.131.450	33.710.131.450	33.710.131.450	-	Tidak
31	'115/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016897/0/0	17.726.400.000	-	17.726.400.000	17.726.400.000	17.726.400.000	-	Tidak
32	'117/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016899/0/0	10.424.940.000	-	10.424.940.000	10.424.940.000	10.424.940.000	-	Tidak
33	'118/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016900/0/0	54.478.257.600	-	54.478.257.600	54.478.257.600	54.478.257.600	-	Tidak
34	'121/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016903/0/0	827.482.000	-	827.482.000	827.482.000	827.482.000	-	Tidak
35	'122/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016970/0/0	17.504.073.000	-	17.504.073.000	17.504.073.000	17.504.073.000	-	Tidak
36	'123/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017451/0/0	1.302.750.000	-	1.302.750.000	1.302.750.000	1.302.750.000	-	Tidak
37	'124/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017452/0/0	3.349.068.000	-	3.349.068.000	3.349.068.000	3.349.068.000	-	Tidak
38	'125.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/10/2023 A/139.23012871/0/1	601.108.000	-	601.108.000	601.108.000	601.108.000	-	Tidak
39	'127/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017455/0/0	1.647.940.000	-	1.647.940.000	1.647.940.000	1.647.940.000	-	Tidak
40	'128/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017456/0/0	2.647.692.000	-	2.647.692.000	2.647.692.000	2.647.692.000	-	Tidak
41	'129/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017457/0/0	1.303.509.645	-	1.303.509.645	1.303.509.645	1.303.509.645	-	Tidak
42	'131/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017165/0/0	665.800.000	-	665.800.000	665.800.000	665.800.000	-	Tidak

DATA KONTRAK DENGAN MEKANISME RPATA

NO	NOMOR KONTRAK	TOTAL NILAI KONTRAK	NILAI KONTRAK SUDAH DIBAYARKAN	NILAI TERMIN RPATA	NILAI SP2D PENAMPUNGAN	NILAI SP2D PEMBAYARAN	SISA SALDO RPATA	LANJUT TA BERIKUTNYA
43	'132/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017255/0/0	1.129.086.600	-	1.129.086.600	1.129.086.600	1.129.086.600	-	Tidak
44	'133.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/10/2023 A/139.23013822/0/1	1.769.670.000	-	1.769.670.000	1.769.670.000	1.769.670.000	-	Tidak
45	'133/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017166/0/0	504.247.000	-	504.247.000	504.247.000	504.247.000	-	Tidak
46	'134/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017459/0/0	1.623.962.200	-	1.623.962.200	1.623.962.200	1.623.962.200	-	Tidak
47	'135/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017474/0/0	48.470.000	-	48.470.000	48.470.000	48.470.000	-	Tidak
48	'136/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23017469/0/0	183.150.000	-	183.150.000	183.150.000	183.150.000	-	Tidak
49	'155.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016236/0/1	179.220.000	-	179.220.000	179.220.000	179.220.000	-	Tidak
50	'156.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016237/0/1	247.800.000	-	247.800.000	247.800.000	247.800.000	-	Tidak
51	'54/PPHTP/KONTRAK/07/2023 A/139.23007790/0/0	313.000.000	-	313.000.000	313.000.000	313.000.000	-	Tidak
52	'57/PPHTP/KONTRAK/08/2023 A/139.23009337/0/0	11.535.500.000	2.307.100.000	9.228.400.000	9.228.400.000	9.228.400.000	-	Tidak
53	'59/PPHTP/KONTRAK/09/2023 A/139.23011065/0/0	4.716.514.000	943.302.800	3.773.211.200	3.773.211.200	3.773.211.200	-	Tidak
54	'60/PPHTP/KONTRAK/09/2023 A/139.23011066/0/0	690.500.000	-	690.500.000	690.500.000	690.500.000	-	Tidak
55	'66/PPHTP/KONTRAK/10/2023 A/139.23014486/0/0	2.502.325.250	-	2.502.325.250	2.502.325.250	2.502.325.250	-	Tidak
56	'69/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23014490/0/0	6.778.900.000	1.355.780.000	5.423.120.000	5.423.120.000	5.423.120.000	-	Tidak
57	'71/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015033/0/0	5.972.060.550	-	5.972.060.550	5.972.060.550	5.972.060.550	-	Tidak
58	'73/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015035/0/0	1.295.200.000	-	1.295.200.000	1.295.200.000	1.295.200.000	-	Tidak
59	'79/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015076/0/0	2.254.371.000	-	2.254.371.000	2.254.371.000	2.254.371.000	-	Tidak
60	'87/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015083/0/0	1.268.000.000	-	1.268.000.000	1.268.000.000	1.268.000.000	-	Tidak
61	'89/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015085/0/0	1.287.500.000	-	1.287.500.000	1.287.500.000	1.287.500.000	-	Tidak
62	'93/PPHTP/KONTRAK/11/2023 A/139.23015770/0/0	1.135.000.000	-	1.135.000.000	1.135.000.000	1.135.000.000	-	Tidak
63	'95/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016696/0/0	3.056.900.000	-	3.056.900.000	3.056.900.000	3.056.900.000	-	Tidak
64	'96/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016697/0/0	9.931.960.000	-	9.931.960.000	9.931.960.000	9.931.960.000	-	Tidak
65	'98/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016725/0/0	2.298.000.000	-	2.298.000.000	2.298.000.000	2.298.000.000	-	Tidak
66	'99/PPHTP/KONTRAK/12/2023 A/139.23016726/0/0	560.089.025	-	560.089.025	560.089.025	560.089.025	-	Tidak
67	III.SEREAALIA/IRA/SPK-PR-NPK/10/11/2023 A/139.23014492/0/0	1.473.750.000	-	1.473.750.000	1.473.750.000	1.473.750.000	-	Tidak
68	IV.AKABI/SKR/71/XII/2023 A/139.23017514/0/0	95.078.000	-	95.078.000	95.078.000	95.078.000	-	Tidak
69	IV.AKABI/SKR/73/XII/2023 A/139.23017513/0/0	159.341.610	-	159.341.610	159.341.610	159.341.610	-	Tidak
70	IV.AKABI/SPK-E/KDL-BNH/181/VI/2023 A/139.23007342/0/0	562.500.000	-	562.500.000	562.500.000	562.500.000	-	Tidak
71	IV.AKABI/SPK-E/KDL-BNH/285/IX/2023 A/139.23011099/0/1	1.896.250.000	1.383.750.000	512.500.000	512.500.000	512.500.000	-	Tidak
72	IV.AKABI/SPK-E/KDL-SIO/256/VIII/2023 A/139.23010877/0/0	116.250.000	-	116.250.000	116.250.000	116.250.000	-	Tidak
73	'001OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016224/0/1	27.000.000.000	-	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	-	Tidak
74	'008OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016473/0/1	4.093.114.500	-	4.093.114.500	4.093.114.500	4.093.114.500	-	Tidak
75	'009OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016474/0/1	9.319.167.000	-	9.319.167.000	9.319.167.000	9.319.167.000	-	Tidak
76	'010OP.Benh.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016736/0/0	154.800.000	-	154.800.000	154.800.000	154.800.000	-	Tidak
77	'011OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016477/0/1	8.736.000.000	-	8.736.000.000	8.736.000.000	8.736.000.000	-	Tidak
78	'012OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016478/0/1	8.340.000.000	-	8.340.000.000	8.340.000.000	8.340.000.000	-	Tidak
79	'018OP.Benh.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016649/0/0	193.500.000	-	193.500.000	193.500.000	193.500.000	-	Tidak
80	'018OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016479/0/0	18.000.000.000	-	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	-	Tidak
81	'021OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016491/0/1	5.618.595.000	-	5.618.595.000	5.618.595.000	5.618.595.000	-	Tidak
82	'025OP.Benh/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016650/0/0	841.675.000	-	841.675.000	841.675.000	841.675.000	-	Tidak
83	'027OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016495/0/0	266.880.000	-	266.880.000	266.880.000	266.880.000	-	Tidak
84	'029OP.Benh/HK-JGG/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016497/0/0	603.000.000	-	603.000.000	603.000.000	603.000.000	-	Tidak

DATA KONTRAK DENGAN MEKANISME RPATA

NO	NOMOR KONTRAK	TOTAL NILAI KONTRAK	NILAI KONTRAK SUDAH DIBAYARKAN	NILAI TERMIN RPATA	NILAI SP2D PENAMPUNGAN	NILAI SP2D PEMBAYARAN	SISA SALDO RPATA	LANJUT TA BERIKUTNYA
85	'029OP.BeniH/HK-PD/SPK-PPK/11/2023 A/139.23016486/0/0	1.266.833.750	-	1.266.833.750	1.266.833.750	1.266.833.750	-	Tidak
86	'033OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016665/0/0	160.605.000	-	160.605.000	160.605.000	160.605.000	-	Tidak
87	'034OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016664/0/0	173.827.500	-	173.827.500	173.827.500	173.827.500	-	Tidak
88	'035OP.BENIH.PL/HK-PPK/11/2023 A/139.23016666/0/0	180.600.000	-	180.600.000	180.600.000	180.600.000	-	Tidak
TOTAL		482.539.020.140	5.989.932.800	476.549.087.340	476.549.087.340	476.549.087.340	-	